

53.61:334-4

A/SEP/1989/013

FUNGSI DAN PERANAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM PENGEMBANGAN USAHATANI TEBU RAKYAT

Studi Kasus

Di Koperasi Unit Desa (KUD) Raga Separéh Wilayah Kerja PG. Krobot, Malang, Jawa Timur

oleh
GATOT TRIYANTO
A 17 0697



JURUSAN ILMU - ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

B O G O R
1984



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumbernya.
a. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
Perpustakaan IPB University

RINGKASAN

GATOT TRIYANTO. Fungsi dan Peranan Koperasi Unit Desa (KUD) Dalam Pengembangan Usahatani Tebu Rakyat, Suatu Studi Kasus di KUD Raga Separéh, Wilayah Kerja PG. Krebet Baru, Kabupaten Malang, Jawa Timur (Di bawah bimbingan T HANAFIAH).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji hubungan antara kelompok tani tebu, pabrik gula dan koperasi unit desa dalam sistem tebu rakyat intensifikasi (TRI),serta untuk mengkaji tingkat komersialisasi petani tebu dalam sistem tersebut.

Dengan adanya perubahan sistem, dari sistem sewa menjadi sistem TRI, ternyata hal ini tidak banyak membawa perubahan pada hubungan antara PG. Krebet Baru sebagai penggiling dan pengolah bahan baku tebu dengan petani sebagai penyedia bahan baku. Sedangkan terhadap peranan KUD Raga Separéh, perubahan sistem ini mengakibatkan keterlibatan peranan KUD dalam sistem tebu rakyat semakin besar dibandingkan dengan sebelumnya.

Bentuk kelompok tani tebu di wilayah KUD Raga Separéh dapat digolongkan dalam bentuk kelompok koordinatif. Tingkat dinamika kelompok koordinatif tersebut cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan pada peranserta anggota dalam pengambilan keputusan, membuat rencana dan membahas masalah bersama, serta peran serta dalam mengikuti pertemuan rata-rata adalah sebesar 88,76 persen.

Pengelolaan usahatani yang paling menguntungkan di wilayah KUD Raga Separéh adalah usahatani TRIS II, kemudian berturut-turut usahatani padi-padi-padi, padi-padi-jagung,



Hal-hal dan tindakan yang diijinkan oleh IPR Universitas IPB
1. Untuk keperluan penelitian, pengajaran, dan pelayanan masyarakat
2. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPR Universitas

TRIS I, TRIT II, Sewa tanah dan paling tidak menguntungkan pada usahatani TRIT I.

Untuk nilai R/C ratio menunjukkan bahwa usahatani padi-padi-padi mempunyai R/C ratio paling tinggi, kemudian berturut-turut pada usahatani padi-padi-jagung, TRIS II, TRIT II, TRIT I dan paling kecil R/C ratio pada usahatani TRIS I.

Hal ini menunjukkan bahwa usahatani padi-padi-padi mempunyai tingkat hasil guna pemakaian modal yang paling tinggi sedangkan usahatani TRIS I sebaliknya.

Tingkat komersialisasi petani berdasarkan analisa ratio tenaga kerja untuk usahatani TRIS I dan TRIT I tidak berbeda jauh. Untuk usahatani TRIS I adalah sebesar 0,8130, artinya 81,30 persen tenaga kerja untuk proses produksi berasal dari luar keluarga. Sedangkan TRIT I adalah sebesar 0,8156, artinya 81,56 persen tenaga kerja untuk proses produksi berasal dari luar keluarga.

Berdasarkan analisa ratio sarana produksi, petani tebu sudah mutlak 100 persen bersifat komersial, artinya semua kebutuhan sarana produksi berupa pupuk, bibit dan obat-obatan dipenuhi dari luar keluarga.

Berdasarkan analisa ratio tenaga kerja dan ratio sarana produksi, secara keseluruhan petani tebu rakyat di wilayah kerja KUD Raga Separéh sudah menuju sistem usaha komersial.



**FUNGSI DAN PERANAN KOPERASI UNIT DESA (KUD) DALAM
PENGEMBANGAN USAHATANI TEBU RAKYAT**

Studi Kasus

**Di Koperasi Unit Desa (KUD) Raga Separih
Wilayah Kerja PG. Krebbe Baru, Malang, Jawa Timur**

Oleh

GATOT TRIYANTO

Laporan Praktek Lapang

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Pertanian

pada

Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor

JURUSAN ILMU-ILMU SOSIAL EKONOMI PERTANIAN

BOGOR

1984

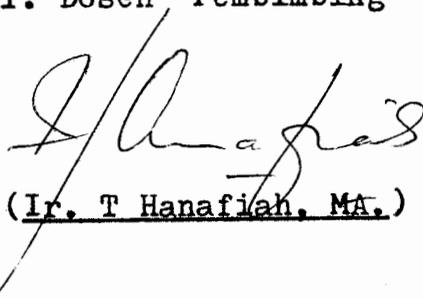
J U D U L : FUNGSI DAN PERANAN KOPERASI UNIT DESA
(KUD) DALAM PENGEMBANGAN USAHATANI TEBU
RAKYAT (Studi Kasus Di KUD Raga Separih,
Malang, Jawa Timur)

Nama Mahasiswa : GATOT TRIYANTO

Nomor Pokok : A. 17 0697

Menyetujui

I. Dosen Pembimbing


(Ir. T. Hanafiah, MA.)

2. Ketua Jurusan Ilmu-ilmu Sosial

Ekonomi Pertanian


(Prof. Dr. Ir. Effendi Anwar)



Tanggal Lulus : 13 DEC 1984



KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah penulis pajatkan kehadiran Allah SWT yang dengan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Lapang ini. Laporan Praktek Lapang ini penulis susun dalam rangka memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana pertanian pada Jurusan Ilmu-ilmu Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Institut Pertanian Bogor.

Laporan ini penulis susun berdasarkan hasil Praktek Lapang di KUD Raga Separéh, Wilayah Kerja PG. Kreet Baru, Kabupaten Malang, Jawa Timur, selama dua bulan yaitu mulai tanggal 9 Juli sampai dengan 9 September 1984.

Pada kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya, kepada :

1. Bapak Ir. T Hanafiah, MA, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan selama pelaksanaan Praktek Lapang dan penulisan laporan ini.
2. Bapak Ir. Bambang Sasono selaku Administratur pabrik gula Kreet Baru dan Bapak H. Nachrowi selaku manajer KUD Raga Separéh yang telah memberikan ijin untuk melakukan prektek lapang.
3. Bapak Soegito, Bapak Abdul Latif, Bapak Tarmuji, serta para karyawan dan staf PG. Kreet Baru dan KUD Raga Separéh atas bantuan yang diberikan selama melakukan praktek lanag.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang menyalin, menjiplak, dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



4. Bapak H. Soeprapto selaku kepala desa dan Bapak H. Effendi selaku ketua kelompok tani tebu serta pamong desa di Desa Pagelaran atas bantuan yang diberikan selama melakukan praktek lapang.

5. Teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu baik selama melakukan praktek lapang maupun selama penulisan laporan ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan membalas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih banyak kekurangannya, namun penulis berharap semoga Laporan Praktek Lapangan ini dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya.

Bogor, Desember 1984

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
I. PENDAHULUAN	
I. 1. Perkembangan Produksi Tebu/Gula di Indonesia	1
I. 2. Perumusan Masalah	3
I. 3. Tujuan dan Kegunaan Praktek Lapang	8
I. 4. Kerangka Pemikiran	
A. Kerangka Teoritis	9
B. Kerangka Operasional	14
I. 5. Kerangka Kerja	
A. Metoda Praktek Lapang	16
B. Metoda Pengumpulan dan Analisa Data	16
II. KEADAAN UMUM PG. KREBET BARU DAN KUD RAGA SEPARIH	
II. 1. Keadaan Umum PG. Krebet Baru	
a. Sejarah dan Perkembangan.....	18
b. Struktur Organisasi	21
c. Potensi dan Kondisi Wilayah Kerja PG. Krebet Baru	25
II. 2. Keadaan Umum KUD Raga Separoh	
a. Sejarah dan Perkembangan.....	29
b. Struktur Organisasi	31
c. Potensi dan Kondisi Wilayah Kerja KUD Raga Separoh	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.



III. FUNGSI DAN PERANAN KUD RAGA SEPARIH DALAM PENGEMBANGAN USAHATANI TEBU RAKYAT

@Hak cipta milik IPB University

- III. 1. Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan TRI
 - a. Organisasi Pengaturan dan Pembinaan 40
 - b. Organisasi di Tingkat Petani..43
- III. 2. Penyediaan dan Pengaturan Areal...48
- III. 3. Pelayanan Kredit dan Sarana Produksi53
- III. 4. Penebangan dan Pengangkutan Tebu..58

IV. ANALISA PENDAPATAN USAHATANI TEBU DAN NON TEBU

- IV. 1. Analisa Pendapatan Usahatani Tebu..62
- IV. 2. Analisa Pendapatan Usahatani Non-Tebu74

V. TELAAHAN TINGKAT KOMERSIALISASI PETANI DALAM USAHATANI TEBU RAKYAT

- V. 1. Ratio Tenaga Kerja 77
- V. 2. Ratio Sarana Produksi 90

VI. PEMBAHASAN

- VI. 1. Konsep Komersialisasi Dalam TRI... 92
- VI. 2. Pendekatan Kelompok Tani Dalam TRI 93

VII. KESIMPULAN DAN SARAN

- VII.1 Kesimpulan 96
- VII.2 S a r a n 99

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN 102

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

DAFTAR TABEL

Nomor	Teks	Halaman
1.	Perkembangan Produksi, Konsumsi dan Impor Gula Indonesia Tahun 1967-1982.....	2
2.	Perkembangan Luas Areal, Produksi dan Produksi per Hektar Gula Seluruh Indonesia Tahun 1967-1982	4
3.	Luas Areal TRI, Produksi per Hektar, serta Jumlah Tebu Yang Digiling di PG. Krebet Baru Tahun 1975/1976-1981/1982.....	20
4.	Keadaan Karyawan PG. Krebet Baru Pada Th.1980	24
5.	Tata Guna Lahan Daerah Kerja PG. Krebet Baru Tahun 1977.....	27
6.	Perkembangan Jumlah Anggota dan Simpanan di KUD Raga Separéh, Tahun 1979-1983.....	30
7.	Tata Guna Lahan di Wilayah Kerja KUD Raga Separéh Tahun 1982.....	37
8.	Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Wilayah Kerja KUD Raga Separéh, Tahun 1979....	38
9.	Tanggapan Petani Tebu Terhadap Program Penyuluhan yang Dilakukan oleh KUD Raga Separéh.....	41
10.	Keikutsertaan Petani Dalam Mengelola Usahatani di Wilayah Kerja KUD Raga Separéh.....	45
11.	Anggota Kelompok Yang Mempunyai Hak dan Wewenang Dalam Mengambil Keputusan	46
12.	Tingkat Peranserta Petani Anggota Kelompok Terhadap Kegiatan Kelompok	46
13.	Perkembangan Jumlah Kelompok, Jumlah Anggota, dan Luas Areal Tahun 1980/1981-1982/1983 di Wilayah KUD Raga Separéh	47
14.	Perkembangan Target dan Realisasi Luas Areal Tanaman TRI di Wilayah PG. Krebet Baru, Tahun 1975/1976-1982/1983	48

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber;
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Teks

15.	Perkembangan Luas Areal TRI di Wilayah KUD Raga Separuh Tahun 1980/1981-1983/1984.....	49
16.	Penyebaran Alasan Petani Ikut Serta Dalam Program TRI di Wilayah KUD Raga Separuh	50
17.	Perkembangan Realisasi Kredit dan Luas Areal TRI di Wilayah KUD Raga Separuh MT. 1980/1981-1983/1984.....	56
18.	Sumber Petani Dalam Memenuhi Kebutuhan Sarana Produksi Pada Usahatani TRI MT. 1983/1984 di Wilayah KUD Raga Separuh	57
19.	Perincian Biaya Tebang dan Angkut per Kwintal Tebu di Wilayah KUD Raga Separuh Tahun 1983..	59
20.	Besar Paket Kredit Pada Usahatani TRIS dan TRIT per Hektar di Wilayah PG. Krebet Baru MT-1982/1983.....	64
21.	Biaya yang Dikeluarkan Pada Usahatani TRIS dan TRIT per Hektar di Wilayah KUD Raga Separuh MT. 1982/1983.....	65
22.	Tambahan Biaya Yang Dikeluarkan Pada Usahatani TRIS dan TRIT per Hektar di Wilayah KUD Raga-Separuh MT. 1982/1983.....	67
23.	Biaya Total Yang Dikeluarkan Pada Usahatani TRIS dan TRIT per Hektar Di Wilayah KUD Raga-Separuh MT. 1982/1983.....	68
24.	Penerimaan Total Yang Diterima Oleh Petani Pada Usahatani TRIS dan TRIT per Hektar di Wilayah KUD Raga Separuh MT. 1982/1983.....	70
25.	Biaya Total, Penerimaan Total, Pendapatan dan R/C Ratio pada Usahatani TRIS dan TRIT per Hektar di Wilayah KUD Raga Separuh MT. 1982/1983.	73
26.	Biaya Total, Penerimaan Total, Pendapatan dan R/C Ratio pada Berbagai Sistem Usahatani yang Diusahakan di Wilayah KUD Raga Separuh MT. - 1982/1983.....	75
27.	Penggunaan Tenaga Kerja Manusia dan Ternak dalam dan Luar Keluarga per Hektar TRIS I, Di Wilayah KUD Raga Separuh MT. 1982/1983.....	79

Teks

- | | | |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 28. | Ratio Penggunaan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Keluarga dengan Total Penggunaan Tenaga Kerja per Hektar Dalam Usahatani TRIS I di Wilayah KUD Raga Separéh, MT. 1982/1983..... | 80 |
| 29. | Ratio Masing-masing jenis Pekerjaan antara Tenaga Kerja Dalam Keluarga dan Luar Keluarga dengan Total Penggunaan Tenaga Kerja per Hektar pada TRIS I, di Wilayah KUD Raga Separéh MT. 1982/1983..... | 82 |
| 30. | Upah Tenaga Kerja Dalam Menyelesaikan satu Hektar Proses Produksi TRIS I, di Wilayah KUD Raga Separéh MT. 1982/1983..... | 83 |
| 31. | Penggunaan Tenaga Kerja Manusia dan Ternak dari dalam dan Luar Keluarga per Hektar pada TRIT I, di Wilayah KUD Raga Separéh MT. 1982/1983..... | 85 |
| 32. | Ratio Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Keluarga dan Luar Keluarga dengan Total Penggunaan Tenaga Kerja per Hektar pada TRIT I, di Wilayah KUD Raga Separéh MT. 1982/1983..... | 87 |
| 33. | Ratio Masing-masing Jenis Pekerjaan Antara Tenaga Kerja Dalam dan Luar Keluarga Dengan Total Penggunaan Tenaga Kerja per Hektar pada TRIT I di Wilayah KUD Raga Separéh MT. 1982/1983.... | 88 |
| 34. | Upah Tenaga Kerja Dalam Menyelesaikan satu Hektar Proses Produksi TRIT I, di Wilayah KUD Raga Separéh MT. 1982/1983..... | 89 |
| 35. | Sumber Sarana Produksi Petani, dan Ratio Sarana Produksi Yang Digunakan Dari Dalam dan Luar Keluarga Dengan Total Penggunaan Sarana Produksi pada TRI per Hektar, di Wilayah KUD Raga Separéh MT. 1982/1983..... | 91 |

Lampiran

- | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1. | Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Wilayah Kerja PG. Krebet Baru Tahun 1982..... | 103 |
|----|------------------------------------------------------------------------------------|-----|



DAFTAR GAMBAR

Nomor	<u>Teks</u>	Halaman
1.	Bagan Struktur Organisasi PG. Krebet Baru.....	23
2.	Bagan Struktur Organisasi KUD Raga Separéh....	34
3.	Bagan Organisasi Pelaksanaan TRI di Wilayah PG. Krebet Baru.....	42
4.	Bagan Struktur Organisasi Kelompok Tani Tebu di Wilayah KUD Raga Separéh.....	44
5.	Bagan Proses Pengajuan Areal Petani Untuk Men- jadi Peserta TRI, di Wilayah KUD Raga Separéh.	52
6.	Bagan Prosedur Perkreditan Dalam Program TRI di Wilayah KUD Raga Separéh.....	55
 <u>Lampiran</u> 		
1.	Peta Wilayah Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang.....	104



I. PENDAHULUAN

I. 1. Perkembangan Produksi Tebu/Gula Di Indonesia

Bila diikuti maka perkembangan produksi tebu/gula di Indonesia ternyata belum begitu menggembirakan. Pada tahun 1928 kedudukan Indonesia adalah sebagai negara penghasil dan pengekspor gula nomor dua di dunia setelah Kuba, tetapi tahun 1967 Indonesia telah berbalik menjadi negara pengimpor gula. Hal ini disebabkan oleh banyaknya pabrik-pabrik gula yang mengalami kerusakan akibat revolusi fisik pada awal kemerdekaan. Di lain pihak karena pertambahan jumlah penduduk konsumsi gula menjadi semakin meningkat, sedangkan jumlah produksi belum mampu untuk memenuhinya, sehingga perimbangan produksi dan konsumsi semakin timpang.

Pada tabel 1, terlihat bahwa produksi rata-rata pada periode tahun 1967 sampai dengan tahun 1975 adalah sebesar 1.030.722 ton per tahun, sedangkan konsumsi rata-rata adalah sebesar 1.140.165 ton per tahun, sehingga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dalam negeri diperlukan impor sebanyak rata-rata 109.443 ton per tahun.

Pada periode tahun 1976 sampai dengan tahun 1982 produksi rata-rata adalah sebesar 1.441.286 ton per tahun, sehingga mengalami kenaikan sebesar 410.564 ton per tahun atau sebesar 39,83 persen per tahun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kenaikan produksi tersebut diikuti pula dengan kenaikan jumlah konsumsi rata-rata sebesar 697.449 ton per tahun atau sebesar 61,17 persen per tahun, dibandingkan

dengan konsumsi periode sebelumnya, sehingga mendorong kenaikan impor sebesar 177.442 ton per tahun atau sebesar 162,13 persen per tahun.

Kenaikan produksi selama periode tersebut di atas, terutama disebabkan oleh kenaikan luas areal. Kenaikan luas areal pertanaman tebu adalah sebesar 186.801 hektar per tahun atau sebesar 132,42 persen per tahun, sedangkan produksi per hektar ternyata mengalami penurunan sebesar 2,7 ton per tahun atau sebesar 36,99 persen per tahun, seperti terlihat pada pada tabel 2.

Berdasarkan data tersebut diatas, ternyata produksi gula mengalami kenaikan tetapi produksi per hektar mengalami penurunan. Menurut Hasrul Harahap (1984)^{1/} hal ini disebabkan karena peranserta petani secara aktif dalam mengusahakan tebu belum mencapai sasaran yang diharapkan. Pembinaan petani supaya menjadi penanam tebu di atas tanahnya sendiri secara total belum terlaksana.

1. 2. Perumusan Masalah

Berdasarkan perkembangan produksi tebu/gula tersebut di atas, perusahaan tebu/gula di Indonesia dapat dibedakan atas (1) Perusahaan dan produksi tebu/gula yang diselenggarakan oleh perkebunan besar sebagai peninggalan Belanda

^{1/} Harahap, Hasrul (1984). TRI harus diamankan sebagai program nasional, Harian Kompas 11 Oktober 1984.

Tabel 2. Perkembangan Luas Areal, Produksi Dan Produksi Per Hektar Gula Seluruh Indonesia th.1967-1982.

Tahun	Luas Areal (hektar)	Produksi (ton)	Produksi Per Hektar (ton)
1967	127.988	936.200	7,3
1968	120.660	805.600	6,7
1969	127.426	943.200	7,4
1970	126.767	909.300	7,2
1971	132.269	1.045.100	7,9
1972	159.867	1.093.100	6,8
1973	169.341	1.080.000	6,4
1974	149.462	1.237.000	8,3
1975	155.864	1.227.000	7,9
1976	208.822	1.319.000	6,3
1977	234.492	1.438.000	5,9
1978	286.162	1.516.000	5,3
1979	343.496	1.601.000	4,7
1980	362.283	1.347.000	3,7
1981	411.685	1.243.000	3,0
1982	448.171	1.625.000	3,6

Sumber : Direktorat Jendral Perkebunan, BP3G, dan BPS (diolah kembali).

yang diambil alih oleh pemerintah Indonesia, maupun perkebunan besar swasta, dan (2) Pengusahaan dan produksi tebu/gula yang diselenggarakan oleh rakyat.

Dalam pengusahaan tanaman tebu tersebut dikenal tiga sistem hubungan penggunaan tanah rakyat, yaitu (1) Sistem sewa; yang merupakan sistem tradisional peninggalan Belanda (2) Sistem bagi hasil ; dan (3) Sistem tebu rakyat intensifikasi (TRI) yang berlaku sekarang.

Pada sistem tradisional yang dilaksanakan oleh Belanda, pabrik gula menyewa tanah dari rakyat, mengupah buruh untuk pekerjaan-pekerjaan penanaman sampai penebangan tebu. Pada dasarnya harapan petani pada sistem sewa ini adalah nilai tanah yang disewakan kepada pabrik gula sama dengan nilai jika petani menggarap tanahnya sendiri untuk menanam padi dua kali dan sekali menanam palawija. Ternyata dalam prakteknya nilai sewa yang diberikan oleh pabrik gula selalu lebih rendah, sedangkan dilain pihak petani tidak dapat menolak keharusan untuk menyewakan tanahnya kepada pabrik gula. Sehingga para petani cenderung menyewakan tanahnya yang kurang subur, serta berusaha memperlambat penyerahan tanahnya selama mungkin, dengan harapan dapat memperoleh tambahan satu kali penanaman padi.

Kebijakan untuk mewajibkan petani menyewakan tanahnya ke pabrik gula tersebut di atas ternyata mengakibatkan tidak terjaminnya kualitas dan kuantitas tebu yang diperlukan oleh pabrik gula sebagai bahan baku. Sehingga produksi gula semakin lama semakin merosot.



Untuk mengatasi masalah di atas, pemerintah melaksanakan sistem bagi hasil, yaitu dengan menghubungkan besarnya sewa terhadap hasil yang diperoleh. Dengan sistem ini petani menerima 25 persen dari hasil kotor bila menyewakan tanahnya kepada pabrik gula, atau 60 persen bila petani juga mengusahakan penanamannya atas kontrak dengan pabrik gula. Pada kenyataannya sistem ini tidak berjalan sebagaimana mestinya dimana petani sesungguhnya hanya menerima 17 persen dari hasil kotor menurut sistem yang pertama atau 31 persen menurut sistem yang kedua. Dengan sistem bagi hasil ini petani merasa dirugikan yang mengakibatkan petani tidak terangsang untuk menanam tebu. Hal ini sangat mempengaruhi persediaan bahan baku tebu untuk memenuhi kapasitas giling pabrik gula.

Pengalaman di atas telah menunjukkan bahwa sistem sewa dan sistem bagi hasil ternyata semakin lama semakin tidak menguntungkan, baik bagi petani pemilik tanah maupun pabrik gula. Bagi petani nilai sewa tanah ataupun nilai bagi hasil yang diterima selalu lebih kecil dibandingkan jika petani menanam padi dan palawija, sedangkan bagi pabrik gula kebutuhan akan jumlah dan mutu tebu sebagai bahan baku tidak tercapai. Akibatnya produksi gula mengalami kemerosotan.

Dalam rangka menuju swasembada gula, pemerintah mengadakan perubahan sistem perusahaan tebu, yaitu dengan meninggalkan sistem sewa peninggalan Belanda dan sistem bagi hasil menuju pada sistem tebu rakyat intensifikasi (TRI).

Tujuan kebijakan baru ini sebagaimana tercantum pada ketentuan INPRES NO. 9 tahun 1975, adalah :

- a. Peningkatan dan pemantapan produksi gula nasional
- b. Peningkatan pendapatan petani
- c. Perluasan lapangan kerja serta pemerataan pendapatan diantara masyarakat desa
- d. Diakhirinya pola tanam tebu dengan sistem sewa.

Penelaahan terhadap sistem TRI, dapat dilakukan terhadap ketiga pelaku utama yang terlibat dalam sistem tersebut, yaitu (a) Pabrik gula, (b) Koperasi Unit Desa, dan (c) Kelompok tani tebu; yang masing-masing mempunyai fungsi dan peranan yang saling menunjang dan terkait antara satu dan lainnya.

Fungsi dan peranan pabrik gula yang terutama adalah sebagai pengolah dan penggiling tebu, yang menghendaki terjaminnya penyediaan bahan baku baik kualitas maupun kuantitasnya. Koperasi Unit Desa sebagai yang mengkoordinasi kelompok tani tebu menghendaki adanya peranserta yang aktif dari kelompok tani tebu. Sedangkan kelompok tani tebu sebagai pengelola langsung usahatani tebu menghendaki ketersediaan kebutuhan sarana produksi dengan tepat dan lancar serta terjaminnya peningkatan pendapatan dari hasil usahatani tebu.

Salah satu kesulitan pokok dalam pelaksanaan sistem TRI adalah pengorganisasian ribuan petani pemilik tanah sempit. Oleh sebab itu pengembangan organisasi petani seperti KUD adalah penting. Dalam keadaan yang demikian KUD dikembangkan menjadi badan usaha ekonomi yang disamping bekerja

Takjaya Ithk IPB University

IPB University

untuk mencari keuntungan berupa sisa hasil usaha, sekaligus juga menjadi pelaksana kebijaksanaan ekonomi pemerintah.

Tantangan utama yang dihadapi oleh KUD dewasa ini bukan lah pada bagaimana melibatkan KUD pada sistem TRI, tetapi pada bagaimana membina petani perorangan agar menjadi sadar perlunya saling bekerjasama dan selanjutnya mempergunakan KUD sebagai wadah kegiatan mereka.

Dalam rangka untuk mensukseskan program TRI, mulai musim tanam tahun 1981/1982 KUD diikuti sertakan, dengan tujuan pokok (1) Untuk meningkatkan dan mengamankan pendapatan petani produsen tebu, dan (2) Untuk meningkatkan peranan KUD sebagai wadah perekonomian rakyat di pedesaan. Dari fungsi dan peranan KUD tersebut diharapkan petani tebu mampu mencapai tingkat komersialisasi, dan dalam bentuk kelompok tani dan koperasi tani, mempunyai kedudukan ekonomi yang kuat. Sehingga hal ini akan menjamin persediaan bahan baku tebu bagi pabrik gula baik kualitas maupun kuantitasnya.

I. 3. Tujuan dan Kegunaan Praktek Lapang

a. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di depan, tujuan penelaahan fungsi dan peranan KUD dalam pengembangan usahatani tebu rakyat, adalah untuk mengkaji :

- (1) Hubungan antara kelompok tani tebu, pabrik gula dan koperasi unit desa dalam sistem tebu rakyat intensifikasi (TRI).
- (2) Tingkat komersialisasi petani tebu dalam sistem tersebut.

b. Kegunaan

Kegunaan telaahan ini diharapkan mampu membantu KUD memecahkan permasalahan dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan serta kegiatan-kegiatan KUD untuk pengembangan usahatani tebu rakyat. Sehingga baik bagi anggota maupun bukan anggota KUD merasakan manfaat kegiatan yang diselenggarakan oleh KUD.

Bagi kelompok tani tebu diharapkan mampu untuk membantu meningkatkan hasil guna secara ekonomis maupun teknis dalam mengelola usahatannya sehingga menjamin pengadaan bahan baku tebu bagi pabrik gula baik kualitas maupun kuantitasnya.

I. 4. Kerangka Pemikiran

A. Kerangka Teoritis

Untuk memperkuat kedudukan petani tebu dan meningkatkan pelayanan produksi, maka diperlukan koordinasi yang baik oleh KUD terhadap petani.

Dalam rangka mewujudkan peranan tersebut, usaha pengembangan KUD selain mempunyai sasaran yang bersifat kuantitatif seperti jumlah fisik KUD dan sebagainya, juga mempunyai sasaran yang bersifat kualitatif, yaitu :

- (1) Agar KUD berdiri sendiri antara lain dengan :
 - a. Memiliki anggota yang aktif dalam jumlah yang cukup memadai
 - b. Memiliki manajemen dan alat perlengkapan KUD yang baik dan berkemampuan tinggi.

- (2) Agar KUD mampu menjadi pusat pelayanan dan wadah utama kegiatan ekonomi pedesaan, dengan melaksanakan/menjalankan fungsi :
- a. Perkreditan, simpan pinjam, pertanggungan kerugian
 - b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi, kebutuhan sehari-hari dan jasa lainnya
 - c. Pengelolaan dan pemasaran hasil-hasil produksi
 - d. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh anggota.

Pembinaan kerjasama diantara petani dalam suatu kelompok hampan diarahkan pada kerjasama kelompok yang bersifat kooperatif, meskipun tahap pertama masih bersifat kolektif dan koordinatif.

Kelompok kolektif adalah suatu kelompok yang semua kegiatan pengelolaan usahatannya dilakukan/diusahakan kepada pengurus kelompok secara kolektif, dengan pengarahan dan pengawasan KUD yang dibina oleh pabrik gula, unit pelaksana proyek dan balai penyuluh pertanian.

Kelompok koordinatif adalah suatu kelompok yang sebagian besar kegiatan pengusahaan tebu dilakukan secara individual oleh masing-masing petani, pengurus kelompok hanya bertindak sebagai koordinator dalam pembinaan kegiatan anggota dan menjadi penghubung dengan pabrik gula, BRI dan KUD.

Sedangkan kelompok kooperatif adalah suatu kelompok yang sebagian besar kegiatan usahatannya dilakukan secara individual oleh masing-masing petani dan beberapa kegiatan tertentu dilakukan oleh pengurus kelompok.



Untuk mencapai tujuan kelompok ditentukan oleh dinamika kelompok, yang dinyatakan oleh Jenkins (1961)^{1/} bahwa dinamika kelompok yaitu kekuatan-kekuatan di dalam kelompok yang menentukan perilaku kelompok dan perilaku anggota kelompok untuk mencapai tujuan kelompok.

Pembinaan kelompok merupakan salah satu unsur dinamika kelompok. Margono S (1978)^{2/} menyatakan bahwa pembinaan kelompok dimaksudkan sebagai usaha mempertahankan kehidupan kelompok. Usaha mempertahankan kehidupan kelompok supaya berhasil salah satunya adalah dengan adanya peranserta semua anggota kelompok. Peranserta timbul dengan adanya peragaan anggota kelompok menjadi bagian kelompok. Semakin tinggi rasa memiliki kelompok, semakin tinggi rasa tanggung jawab anggota kelompok terhadap kelompoknya sehingga semakin tinggi tingkat peransertanya.

Sedangkan menurut Cartwright dan Zender (1968)^{3/} komunikasi yang tidak lancar di dalam kelompok menyebabkan ketidakpuasan anggota kelompok untuk ber peranserta di dalam kelompok, kelompok semakin kompak jika perbedaan diantara anggota kelompok semakin tidak dirasakan.

Kepemimpinan kelompok seharusnya dapat menumbuhkan rasa kesamaan diantara anggota kelompok. Kepemimpinan kelompok seharusnya dapat menetralkan setiap perbedaan di dalam kelompok

1/ Jenkins (1961). What is group dynamics ? ed Group Development Selected Reading Series One, Washington 6, DC.

2/ Margono S (1978). Kumpulan Bahan Bacaan Penyuluhan Pertanian Edisi ke Tiga, Bogor.

3/ Cartwright, D dan A. Zender (1968). Group Dynamics, Research and Theory, Harper & Row, Publisher, New York.

juga dapat diartikan sebagai balas jasa dari kerjasama faktor produksi.

Selanjutnya pendapatan selain diukur dengan nilai mutlak juga dapat dianalisa efisiensinya. Salah satu ukuran efisiensi yang sering digunakan adalah penerimaan untuk setiap rupiah yang dikeluarkan atau " Revenue Cost Ratio atau R/C ratio ".

Dengan R/C ratio ini dapat diperbandingkan tentang keuntungan dari berbagai pilihan cabang usahatani, secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut :

$$R/C = \frac{\sum_{i=1}^k Y_i P_{y_i}}{\sum_{i=1}^n X_i P_{x_i}}$$

Dimana :

Y = Salah satu produksi fisik dari cabang usahatani

P_y = Harga produk per satuan fisik yang diterima

X = Salah satu input yang digunakan dalam cabang usahatani

P_x = Harga satuan input yang digunakan

1..... n= Banyaknya jenis input yang digunakan dalam pelaksanaan cabang usahatani

1..... k= Banyaknya jenis produk yang dihasilkan.

B. Kerangka Operasional

Untuk pelaksanaan praktek lapang ini maka perlu adanya batasan istilah maupun tolok ukur yang akan dilaksanakan di lapang, adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sistem komunikasi dalam kelompok diajukkan pertanyaan-pertanyaan, bagaimana pesan disampaikan kepada semua anggota kelompok. Pesan dibatasi dalam hal teknologi usahatani, makin banyak anggota yang menerima pesan itu, makin baik sistem komunikasi dalam kelompok itu.
2. Peranserta dalam kegiatan kelompok, diukur dengan adanya kegiatan-kegiatan kelompok yang terus-menerus selama kelompok berdiri. Sejumlah kegiatan yang diukur antara lain kerjasama dalam kelompok mengenai pengadaan sarana produksi (bibit, pupuk dan obat-obatan), mengatur air, perlindungan tanaman, perluasan usahatani dan perbaikan jalan komunikasi. Semakin banyak atau lengkap musim-musim yang terisi dengan kegiatan, serta semakin banyak orang yang ikut dalam kegiatan kelompok maka semakin tinggi tingkat peranserta.
3. Untuk mengetahui otoritas dan wewenang, diajukan pertanyaan kepada semua orang yang terlibat, yaitu tentang proses pengambilan keputusan. Siapa yang mempunyai hak mengambil keputusan itu; ketua, pengurus atau semua orang mempunyai hak dalam pengambilan keputusan.
4. Fungsi dan peranan KUD disesuaikan dengan SK. Mentan No. 10/SK/Mentan/BIMAS/XII/1983, tentang TRI, MT 1984/1985.



5. Usahatani yang dimaksud adalah sebagai suatu organisasi produksi dimana petani bertindak sebagai pengelola mengorganisasikan alam, modal dan tenaga kerja, untuk berproduksi dilapangan pertanian baik berdasarkan atas pencarian laba atau tidak.
6. Sistem tebu rakyat dalam hal ini adalah sistem tebu rakyat intensifikasi (TRI) yang ditetapkan berdasarkan INPRES No. 9 tahun 1975, yaitu tanaman tebu yang diusahakan sendiri oleh petani di atas tanah sawah atau tegal dalam rangka hubungan kerjasama dengan pabrik gula maupun tidak. Tanaman tebu rakyat intensifikasi yang diusahakan di lahan sawah dan merupakan tanaman pertama disebut TRIS I dan untuk tanaman kedua atau keprasan disebut TRIS II. Tanaman tebu rakyat intensifikasi yang diusahakan di lahan tegalan dan merupakan tanaman pertama disebut TRIT I dan untuk tanaman kedua atau keprasan disebut TRIT II.
7. Konsep penerimaan usahatani TRIS I, TRIS II, TRIT I dan TRIT II adalah penerimaan total baik berupa hasil penjualan produk maupun yang diperhitungkan sebagai penerimaan lain. Penerimaan ini dinyatakan per hektar.
8. Pendapatan merupakan selisih antara penerimaan total dengan biaya total, yang dinyatakan per hektar.
9. Dalam menganalisa dan membandingkan usahatani TRIS, TRIT, non tebu dan sewa tanah dipergunakan kurun waktu, yaitu untuk usahatani TRIS I dan TRIT I umur tanaman 13 bulan, untuk usahatani TRIS II, TRIT II, non tebu dan sewa tanah menggunakan kurun waktu 12 bulan.



10. Untuk mengetahui tingkat komersialisasi petani tebu rakyat dipergunakan kriteria (a) Ratio tenaga kerja, yaitu perbandingan antara jumlah tenaga kerja (HKP) dari luar keluarga dengan jumlah total tenaga kerja (HKP) yang digunakan dalam usahatani; (b) Ratio sarana produksi, yaitu perbandingan antara jumlah sarana produksi yang digunakan dari luar keluarga dengan jumlah total sarana produksi yang digunakan dalam usahatani.
11. Asumsi yang digunakan dalam analisa ini adalah, kemampuan berproduksi semua tanah serta ketrampilan petani dalam mengelola usahatannya adalah sama.

I. 5. Kerangka Kerja

A. Metoda Praktek Lapang

Metoda yang digunakan adalah metoda studi kasus, yaitu pengkajian secara mendalam dan mencakup segala aspek serta memberikan gambaran yang terperinci dengan tekanan pada situasi keseluruhan mengenai proses atau urutan suatu kejadian. Yaitu pada sistem tebu rakyat intensifikasi (TRI) yang melibatkan (a) Pabrik Gula; (b) Koperasi Unit Desa (KUD) dan (c) Kelompok tani tebu rakyat.

B. Metoda Pengumpulan dan Analisa Data

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan mewawancarai 30 petani yang terdiri dari; 13 petani tebu rakyat intensifikasi

yang mengelola lahan sawah (TRIS), 9 petani tebu rakyat in tensifikasi yang mengelola lahan tegalan (TRIT) dan 8 petani yang mengelola lahan selain tanaman tebu. Sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi yang ada hubungannya dengan penelitian.

Metoda pengambilan petani contoh dilakukan dengan cara sebagai berikut : Dari sejumlah desa yang ada di wilayah kerja KUD Raga Separéh diambil secara sengaja (purposive) satu desa yang akan dijadikan tempat pengambilan petani con toh (sample). Pengambilan secara sengaja ini agar diperoleh petani yang mengusahakan TRIS, TRIT, Non tebu dan Sewa tanah yang secara sosial ekonomi dan teknis relatif sama. Dari desa terpilih diambil secara acak sederhana petani yang me ngusahakan TRIS, TRIT, dan Non tebu.

Pengolahan dan analisa data kuantitatif dan kualitatif dilakukan dengan metoda tabulasi dan diskriptip.



II. KEADAAN UMUM PABRIK GULA KREBET BARU DAN KOPERASI UNIT DESA RAGA SEPARIH

1. Keadaan Umum Pabrik Gula Krebet Baru

a. Sejarah dan Perkembangan

Pabrik Gula (PG) Krebet Baru adalah anak perusahaan dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia yang berkedudukan di Jakarta, didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1906, yang kemudian pada tahun 1942 dibeli oleh Oei Tiong Ham.

Pada periode tahun 1947 sampai dengan tahun 1953, PG.Krebet Baru tidak dapat menjalankan fungsinya, karena kerusakan yang dialami pada masa revolusi kemerdekaan. Baru pada awal tahun 1954 atas desakan petani tebu Malang Selatan dan Kementerian Agraria pada waktu itu, maka PG.Krebet Baru dibangun kembali oleh Oei Tiong Ham Concern bekerjasama dengan Bank Industri Negara (BIN).

Kementerian Agraria memberikan izin pembangunan kembali PG.Krebet Baru dengan syarat hanya menggiling tebu rakyat, dan tidak boleh menyewa tanah untuk tanaman tebu, dan persyaratan ini masih berlaku hingga sekarang. Sehingga pada akhir tahun 1954 PG. Krebet Baru mulai menggiling tebu rakyat Malang Selatan dengan kapasitas giling 1.600 ton tebu per hari.

Pengelolaan pabrik gula oleh perusahaan Oei Tiong Ham Concern hanya berlangsung selama kurang lebih 8 tahun, dan pada tahun 1961 perusahaan ini diambil alih oleh pemerintah Republik Indonesia dan ditempatkan pada departemen keuangan.

Sedangkan pengelolaan perusahaan kemudian diserahkan kepada salah satu anak perusahaan dari PT. Rajawali Nusantara Indonesia, yaitu PT. IMACO (Industrial Manajemen Company) yang berpusat di Surabaya dengan hubungan kontrak kerja yang masih berlaku hingga sekarang.

Dengan investasi modal pemerintah pada tahun 1968, dilakukan perbaikan pabrik gula untuk meningkatkan kapasitas giling. Sehingga pada tahun 1974 kapasitas giling pabrik gula Krebet Baru telah meningkat menjadi 2.000 ton tebu per hari.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa kapasitas giling belum mampu menampung semua tebu yang dihasilkan oleh rakyat. Untuk mengatasi hal ini, pada tahun 1974 dibangun pabrik baru dengan kapasitas giling 3.000 ton tebu per hari yang selanjutnya diberi nama PG. Krebet Baru Unit II (KB-II), dan pabrik sebelumnya dengan nama PG. Krebet Baru Unit I - (KB-I). Sehingga secara keseluruhan kapasitas giling PG. Krebet Baru menjadi 5.000 ton tebu per hari.

Pada tabel 3, terlihat perkembangan luas areal tebu rakyat sebagai penyedia bahan baku tebu bagi PG. Krebet Baru selama tahun 1975/1976 sampai dengan tahun 1981/1982 mengalami kenaikan rata-rata adalah sebesar 782,85 hektar per tahun atau sebesar 19,06 persen per tahun. Kenaikan ini terutama karena adanya program TRI yang ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 1975, yaitu berdasarkan INPRES No. 9 tahun 1975. Ternyata kenaikan luas areal tersebut diikuti dengan menurunnya produksi tebu per hektar sebesar 51 kwintal per tahun,

atau sebesar 26,07 persen per tahun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh jenis tebu yang ditanam bukanlah jenis unggul seperti yang dianjurkan, serta keprasan lebih dari satu kali sehingga produksi per hektar cenderung mengalami penurunan. Sedangkan jumlah tebu yang digiling oleh PG. Krebet-Baru rata-rata mengalami kenaikan sebesar 872.253,5 kwintal per tahun atau sebesar 22,59 persen per tahun. Hal ini karena adanya kenaikan luas areal tersebut di atas.

Tabel 3. Luas Areal TRI, Produksi per Hektar, serta Jumlah Tebu yang Digiling di PG. Krebet Baru, tahun 1975/1976-1981/1982.

Tahun	Luas Areal (Ha)	Produksi per Hektar (Kw)	Jumlah Tebu yang Digiling (Kw)
1975/1976	4.251,425	976	2.593.398
1976/1977	3.837,669	1.168	3.778.240
1977/1978	4.924,653	1.142	4.274.467
1978/1979	10.131,843	705	6.008.705
1979/1980	11.249,122	530	5.482.742
1980/1981	10.935,970	568	5.235.783
1981/1982	8.948,535	670	7.826.919

Sumber : Bagian Tanaman PG. Krebet Baru.

b. Struktur Organisasi PG. Kreet Baru

PG. Kreet Baru dipimpin oleh pimpinan pabrik gula yang lebih dikenal dengan nama "Administratur". Dalam struktur organisasi perusahaan Administratur bertanggung jawab langsung terhadap direksi PT. IMACO. Dalam menjalankan tugas, Administratur dibantu oleh Administratur muda dan empat kepala bagian, yaitu kepala bagian tata usaha dan keuangan, kepala bagian tanaman, kepala bagian instalasi, dan kepala bagian pabrikasi.

Penjelasan mengenai struktur organisasi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

b. 1. Administratur

Administratur merupakan pimpinan pabrik gula yang bertanggung jawab langsung pada direksi PT. IMACO. Walaupun demikian dalam mengelola pabrik gula, Administratur lebih bersifat otonomi. PT. IMACO dalam hubungan ini hanya memberikan pengarahan dan kebijaksanaan secara umum.

Tugas Administratur meliputi semua kegiatan yang ada pada perusahaan, mulai dari perencanaan dan pengembangan areal tebu, agar kapasitas produksi dapat tercapai. Juga melaksanakan peraturan, tata kerja dan cara-cara yang telah disetujui oleh direksi, serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada kepala bagian.

b. 2. Administratur Muda

Pada dasarnya tugas Administratur muda adalah membantu Administratur dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari.

Administratur muda dalam melaksanakan tugasnya hanya bertanggung jawab kepada Administratur dan tidak membawahi ke empat kepala bagian secara langsung.

b. 3. Bagian Tata Usaha dan Keuangan

Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala bagian tata-usaha dan keuangan. Dalam menjalankan tugasnya kepala bagian ini dibantu oleh beberapa seksi, yaitu seksi tata usaha dan umum, seksi akuntansi, seksi kas dan bank, serta seksi pergudangan.

Tugas dan tanggung jawab bagian ini meliputi masalah-masalah umum, pembukuan dan keuangan yang berlangsung di pabrik gula.

b. 4. Bagian Tanaman

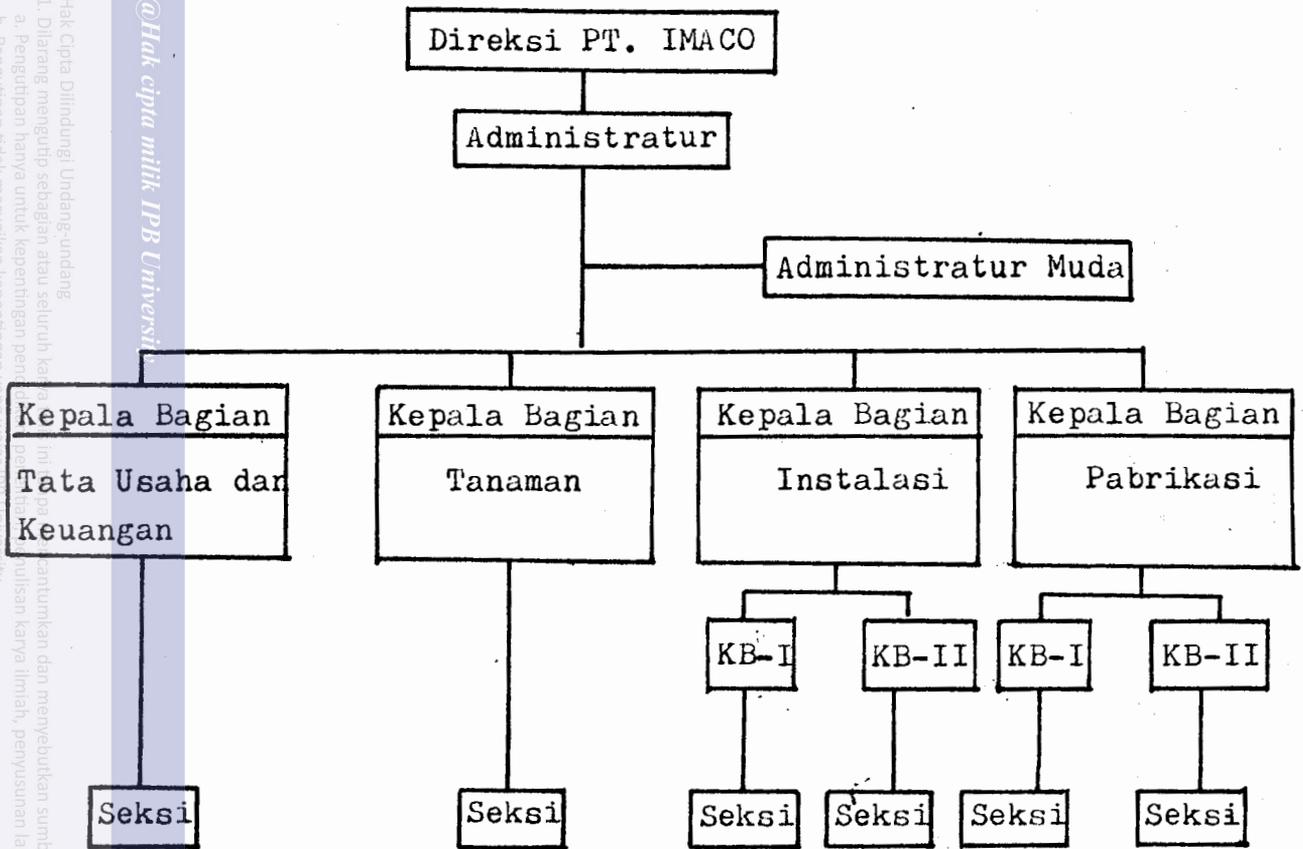
Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala bagian tanaman. Dalam menjalankan tugasnya, kepala bagian tanaman dibantu oleh beberapa kepala rayon dan kepala angkutan, sedangkan kepala rayon dibantu oleh beberapa sinder.

Tugas dan tanggung jawab bagian ini adalah membuat rencana-rencana kegiatan operasi tanaman, memberikan bimbingan kultur teknis kepada para petani, mengadakan pengawasan pada tanaman tebu sejak di lapang sampai saat giling. Sehingga dapat dikatakan bahwa tugas pokok bagian ini adalah menyediakan bahan baku yang siap digiling pada setiap musim giling secara terus menerus bagi pabrik gula.

b. 5. Bagian Instalasi

Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala bagian instalasi. Kepala bagian ini membawahi instalasi KB-I dan KB-II

Gambar 1. Bagan Struktur Organisasi PG. Kreet Baru



Sumber : PG. Kreet Baru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya ini
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh beberapa seksi.

Tugas dan tanggung jawab bagian ini meliputi kelancaran mesin-mesin pabrik, alat-alat pengolahan serta pemeliharaan.

b. 6. Bagian Pabrikasi

Bagian ini dipimpin oleh seorang kepala bagian pabrikasi. Kepala bagian ini bertanggung jawab atas kelancaran dan terselenggaranya pengolahan produksi dari tebu menjadi gula dengan hasil tambahannya yaitu tetes. Dalam menjalankan tugasnya bagian ini dibantu oleh seksi pengolahan, seksi timbangan, dan seksi laboratorium.

Pada tahun 1980 PG. Kreet Baru mempunyai jumlah karyawan sebesar 3.078 orang, yang terdiri dari ; Karyawan I (karyawan pimpinan) sejumlah 76 orang, dan karyawan II (karyawan bukan pimpinan) sejumlah 3.002 orang. Karyawan II terdiri dari, karyawan tetap sejumlah 876 orang, karyawan musiman sejumlah 2.016 orang dan karyawan harian lepas sejumlah 104 orang, seperti terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Keadaan Karyawan PG. Kreet Baru Pada Tahun 1980

Jenis Karyawan	Jumlah (orang)
Karyawan I	76
Karyawan II :	
a. Karyawan Tetap	876
b. Karyawan Musiman	2.016
c. Karyawan Harian Lepas	104

Sumber : PG. Kreet Baru

c. Potensi dan Kondisi Wilayah Kerja PG. Krebet Baru

c. 1. Lokasi, Wilayah Kerja dan Keadaan Perhubungan

Pabrik gula Krebet Baru terletak di desa Krebet, kecamatan Bululawang, kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur.

Desa Krebet berjarak kurang lebih 13 km ke sebelah selatan ibu kota kabupaten Malang, dan terletak kurang lebih 104 km dari Surabaya ibu kota Propinsi Jawa Timur.

Wilayah kerja PG. Krebet Baru mencakup 14 kecamatan, 4 rayon yang terdiri dari 13 kesinderan (afdeling). Jarak terjauh wilayah kerja PG. Krebet Baru kurang lebih 40 km dari desa Krebet.

Sarana perhubungan dan komunikasi dari pabrik gula ke ibu kota kecamatan, kabupaten maupun propinsi dihubungkan dengan jalan beraspal dalam kondisi yang cukup baik. Sarana transportasi yang sering digunakan untuk mengangkut tebu dari kebun atau sawah petani ke pabrik adalah lori, truk dan cikar.

c. 2. Topografi

Daerah kerja PG. Krebet Baru berada diantara dua pegunungan, yaitu pegunungan Tengger dan Kawi. Walaupun demikian, daerah ini umumnya datar dan sedikit yang berbukit. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar antara 300 sampai dengan 400 meter.

c. 3. Keadaan Iklim

Keadaan iklim di wilayah kerja PG. Kreet Baru, menurut klasifikasi Oldemen (1975) yang didasarkan kepada perbandingan bulan basah (bulan dengan curah hujan 200 mm) dan bulan kering (bulan dengan curah hujan 100 mm), maka termasuk tipe C. Adapun keadaan curah hujan dan keadaan jumlah hari hujan di wilayah kerja PG. Kreet Baru tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

Di wilayah kerja PG. Kreet Baru musim hujan biasanya jatuh pada bulan September/ Oktober sampai bulan Mei, sedangkan musim kemarau di wilayah tersebut terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan September/ Oktober.

Keadaan iklim diatas perlu diketahui , karena hal tersebut sangat mempengaruhi tingkat rendemen yang diperoleh. Karena untuk mendapatkan tingkat rendemen yang tinggi perlu memperhatikan keadaan curah hujan, baik pada saat proses penanaman sampai dengan penebangan tebu. Pada saat penanaman tebu relatif membutuhkan curah hujan lebih tinggi dari pada saat menjelang penebangan.

c. 4. Keadaan Tanah

Sebagian besar tanah di daerah kerja PG. Kreet Baru adalah jenis regosol coklat, mediteran coklat kemerahan, dan sebagian kecil jenis latosol coklat kemerahan, kompleks mediteran/latosol/renzima serta tanah aluvial.

c. 5. Penggunaan Lahan

Gambaran pola penggunaan lahan pertanian dapat dilihat pada tabel 5.

Tabel 5. Tata Guna Lahan Di Daerah Kerja PG. Krebet Baru tahun 1977.

Kecamatan	Pemukiman	Pertanian	Perkebunan Lain-lain	
			(Hektar)	
Lawang	799	3.981	1.575	800
Singosari	956	6.773	2.116	2.705
Dau	725	4.145	415	1.750
Jabung	750	4.890	900	6.140
Bululawang	776	4.159	-	260
Gondanglegi	1.665	9.055	-	280
Wajak	1.126	4.862	1.257	5.240
Turen	1.366	4.672	100	282
Dampit	2.786	8.525	2.607	977
Ampel Gading	2.836	7.927	6.366	25.566
Sumbermanjing	1.240	9.216	7.634	9.070
Pagak	896	6.493	1.276	345
Donomulyo	2.366	9.335	1.168	4.666
Bantur	1.528	23.393	1.672	7.982

Sumber: Kantor Agraria

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa, sebagian besar tanah di wilayah kerja PG. Krebet Baru dipergunakan untuk bidang pertanian. Dari luas areal tanah pertanian sebesar 107.426 hektar, terdiri dari 23.844 hektar tanah sawah dan 83.582 hektar tanah tegalan.

Tanaman tebu di wilayah pabrik gula biasanya diusahakan di tanah sawah maupun tanah tegalan. Di tanah sawah diusahakan sejak sebelum perang kemerdekaan, terutama sawah yang berpengairan baik. Sedangkan penanaman tebu di tanah tegalan dilakukan setelah perang kemerdekaan, yaitu sekitar tahun 1950.

Di wilayah kerja PG. Krebet Baru selain usahatani tebu juga dikenal pola usahatani padi, palawija dan tanaman hortikultura (pepaya, semangka dan lain-lain), sehingga baik di sawah maupun di tegalan secara umum dijumpai dua pola pergiliran tanaman.

Di tanah sawah, pola pergiliran tanamannya secara umum adalah, padi-padi-palawija, dan tebu. Palawija yang biasa diusahakan adalah jagung dan kacang tanah. Sedangkan pola pergiliran tanaman pada tanah tegalan secara umum adalah palawija sepanjang tahun dan tebu. Palawija yang biasa ditanam di tanah tegalan adalah jagung, ketela pohon dan kacang tanah.

Kecuali untuk tanaman tebu dan padi, usahatani tanaman palawija masih dilakukan secara tradisional, yaitu masih kurang mempergunakan panca usahatani.



II. 2. Keadaan Umum Koperasi Unit Desa Raga Separih

a. Sejarah dan Perkembangan

Sejarah dan perkembangan Koperasi Unit Desa (KUD) Raga Separih tidak terlepas pada sejarah dan perkembangan PG. K^{re}bet Baru. Dengan adanya perbaikan dan pembangunan PG. K^{re}bet Baru serta makin meluasnya areal tebu rakyat, maka diperlukan adanya wadah untuk mengatur pengelolaan penyediaan bahan baku tebu tersebut.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka pada tahun 1953 dibentuk organisasi tebu rakyat yang diberi nama "Persatuan Penanam dan Pemilik Tebu Rakyat Malang Selatan", dengan singkatan PETERMAS. Untuk lebih memperkuat kedudukan organisasi tersebut, maka pada tahun 1968 telah berubah menjadi organisasi yang berbadan hukum, yaitu koperasi, dengan nama "Koperasi Petermas". Sampai tahun 1971 selain koperasi Petermas ternyata berdiri pula koperasi KPTR dan koperasi Primkopad.

Dengan adanya INPRES No. 4 tahun 1973 tentang pembentukan BUUD/KUD, maka dibentuklah BUUD/KUD di Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang. Usaha yang ditangani adalah penyaluran sarana produksi dan pengadaan pangan.

Pada tahun 1978 BUUD/KUD Gondanglegi telah mendewasakan diri menjadi KUD dengan nama KUD Gondanglegi yang berbadan hukum No. 4052/BH/II/78. Pada tahun 1979 nama koperasi tebu rakyat di Gondanglegi telah melebur diri (beramal gamasi) menjadi KUD dengan nama KUD Raga Separih.

Hak Cipta: Hinduningsih, 2010
1. Dilarang mengutip, menyalin, atau menjiplak seluruh atau sebagian isi karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
a. Pengutipan tidak mengikat kepentingan pendidikan, penelitian, kritikan konstruktif, atau tujuan sosial lainnya.
b. Pengutipan tidak mengikat kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Takipia
IPB University

Setelah terjadi amalgamasi, semua pengurus koperasi - koperasi tebu rakyat yang ada sebelumnya diangkat menjadi pengurus KUD Raga Separéh. Pada tahun 1980 diadakan pemilihan pengurus baru untuk masa jabatan tahun 1980 sampai dengan tahun 1983.

KUD Raga Separéh pada tahun 1981 telah ditetapkan menjadi KUD model berdasarkan SK. No. 277/DK/KPTS/A/II/1981.

Bila diikuti, sejak tahun 1979 sampai dengan tahun 1983 perkembangan jumlah anggota dan jumlah simpanan yang ada di KUD Raga Separéh ternyata menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat. Untuk jumlah anggota rata-rata tiap tahun mengalami peningkatan sebesar 318 orang atau 7,57 persen. Sedangkan jumlah simpanan mengalami peningkatan rata-rata tiap tahun sebesar Rp. 432.425 atau sebesar 3,30 persen, seperti terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Perkembangan jumlah anggota dan simpanan di KUD Raga Separéh, pada tahun 1979-1983.

Tahun	Jumlah anggota (Orang)	Persentase Perubahan	Jumlah Simpanan (Rupiah)	Persentase Perubahan
1979	3.816		10.371.650	
1980	4.016	5,24	13.706.500	3,23
1981	4.613	15,31	13.816.250	0,80
1982	4.974	7,40	14.081.250	1,92
1983	5.089	2,31	15.101.350	7,24

Sumber : KUD Raga Separéh.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
 Cipta Hindia: Undang-undang...
 Hak cipta dilindungi undang-undang...
 Seluruh atau sebagian isi buku ini...
 Pengutipan untuk kepentingan pendidikan...
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

Perkembangan jumlah anggota dan jumlah simpanan tersebut di atas terutama disebabkan oleh adanya perkembangan unit usaha yang dijalankan KUD Raga Separéh. Adapun unit usaha yang sampai sekarang dilaksanakan adalah, (1) Unit usaha pangan, (2) Unit usaha BIMAS, (3) Unit usaha tebu rakyat intensifikasi (TRI), (4) Unit usaha kredit candak kulak (KCK), serta (5) Unit usaha sarana produksi.

Unit-unit usaha tersebut di atas dikelola oleh karyawan berjumlah 46 orang, yang terdiri dari 28 orang karyawan tetap dan 18 orang karyawan musiman. Serta terdapat seorang komisaris ditiap desa.

b. Struktur Organisasi

Dalam struktur organisasi KUD Raga Separéh pada dasarnya terdiri atas; rapat anggota yang mempunyai kedudukan tertinggi di bawahnya adalah pengurus yaitu sebagai pelaksana kebijaksanaan KUD yang mendapat pengawasan dari badan pemeriksa. Pelaksanaan dan pengelolaan unit usaha dikoordinasi oleh manajer yang bertanggung jawab kepada pengurus, seperti terlihat pada gambar 2.

Penjelasan mengenai struktur dan fungsi organisasi tersebut dapat diterangkan sebagai berikut :

b. 1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi dalam tata kehidupan koperasi. Rapat anggota menetapkan anggaran-dasar koperasi, kebijaksanaan umum koperasi, pemilihan dan pengangkatan serta pemberhentian pengurus dan badan pemeriksa.

Rapat anggota juga menetapkan rencana kerja, anggaran belanja, pengesahan neraca koperasi dan kebijaksanaan pengurus dalam pelaksanaan bidang organisasi dan usaha koperasi.

Rapat anggota tahunan merupakan rapat tutup tahun buku koperasi yang harus dilaksanakan setiap akhir tahun buku, sebagai pertanggungjawaban koperasi sebagai organisasi ekonomi atau perusahaan.

b. 2. Pengurus

Pengurus sebagai unsur manajemen kedua setelah rapat anggota, bertanggung jawab sebagai badan yang memimpin koperasi. Pengurus berkewajiban untuk melaksanakan garis-garis besar usaha yang telah ditentukan oleh rapat anggota yang tercantum dalam anggaran dasar maupun anggaran rumah-tangga koperasi.

Pengurus merupakan personifikasi badan hukum koperasi yang mewakili koperasi baik di dalam maupun di luar pengadilan. Oleh karena itu pengurus mengesahkan secara hukum semua perjanjian dan kontrak yang dilaksanakan oleh koperasi.

Pengurus mempunyai hak untuk mengadakan rapat biasa maupun rapat khusus baik diperintahkan oleh rapat anggota maupun tidak. Pengurus juga mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan manajer.

b. 3. Badan Pemeriksa

Badan pemeriksa merupakan salah satu diantara alat perlengkapan organisasi koperasi disamping rapat anggota dan pengurus. Badan pemeriksa mempunyai tugas untuk melakukan

pengawasan dan pemeriksaan terhadap kehidupan koperasi yang menyangkut organisasi, usaha dan kebijaksanaan pengurus.

Badan pemeriksa dipilih dari kalangan anggota, oleh anggota dalam rapat anggota. Keanggotaan badan pemeriksa tidak dapat dirangkap dengan jabatan pengurus.

Badan pemeriksa bertanggung jawab kepada rapat anggota. Oleh karena itu badan pemeriksa harus memberikan laporan pemeriksaan kepada rapat anggota, dan merahasiakan hasil pemeriksaannya kepada pihak ketiga.

b. 4. Manajer

Manajer adalah pelaksana yang diberi kuasa oleh pengurus untuk melaksanakan kegiatan sehari-hari dibidang usaha. Manajer diangkat dan diberhentikan oleh pengurus, oleh sebab itu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pengurus.

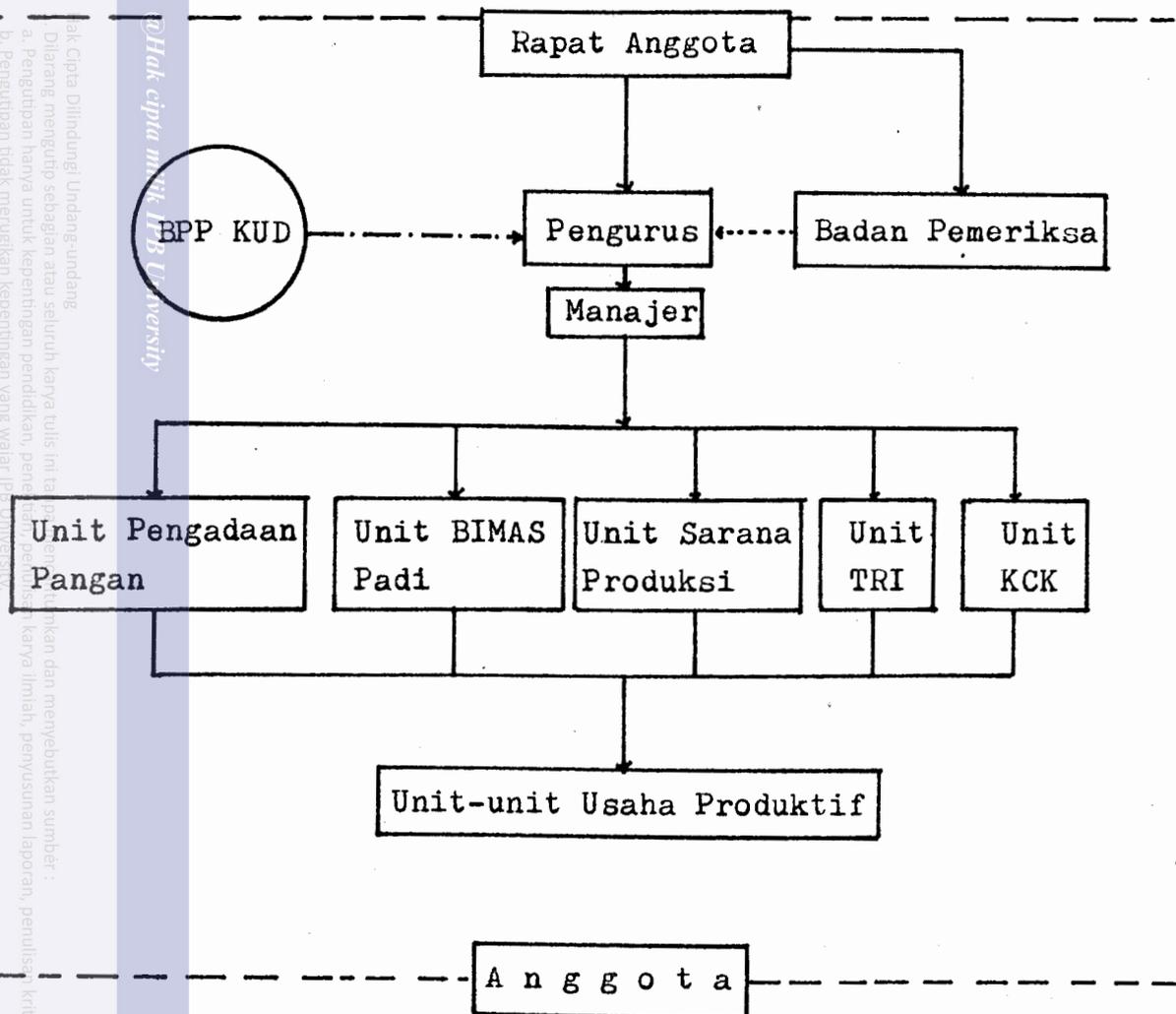
Manajer mempunyai beberapa fungsi yang sebenarnya fungsi-fungsi yang telah digariskan oleh pengurus. Fungsi utama manajer adalah : perencanaan, pengorganisasian, pengerahan, koordinasi dan pengawasan.

b. 5. Unit Usaha Yang Dikembangkan

b. 5. 1. Unit Pengadaan Pangan.

Unit usaha ini melaksanakan pembelian gabah dan beras dari petani dengan harga dasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan menjual gabah dan beras kepada pemerintah melalui DOLOG, untuk persediaan beras secara nasional.

Gambar 2. Bagan Struktur Organisasi KUD Raga Separéh



Keterangan :

- - - - - = Garis Pengawasan
- = Garis Komando
- · - · - = Garis Bimbingan dan Perlindungan

Sumber : KUD Raga Separéh

b. 5. 2. Unit Sarana Produksi

Unit usaha ini bertugas untuk melayani sarana produksi berupa pupuk dan obat-obatan, terutama untuk tanaman yang mengikuti program BIMAS/INMAS padi dan palawija.

b. 5. 3. Unit BIMAS padi

Unit usaha ini bertugas untuk memberikan kredit kepada petani berupa sarana produksi dan uang biaya garapan.

b. 5. 4. Unit Kredit Candak Kulak (KCK)

Unit usaha ini memberikan kredit kepada para pedagang kecil (bakul) dengan jangka waktu tiga bulan.

b. 5. 5. Unit Tebu Rakyat Intensifikasi (TRI)

Unit usaha ini merupakan unit usaha yang sangat potensial pada KUD Raga Separéh. Unit usaha ini melayani para petani penanam tebu, yaitu mulai dari tanam sampai dengan pengiriman hasil tebu ke pabrik gula. Juga pelayanan kredit untuk pembiayaan pengolahan tanah, pemeliharaan tanaman, biaya hidup serta biaya terbang dan angkut.

c. Potensi dan Kondisi Wilayah Kerja KUD Raga Separéh

c. 1. Lokasi Wilayah Kerja dan Keadaan Perhubungan

KUD Raga Separéh terletak di desa Gondanglegi Kulon, Kecamatan Gondanglegi, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur. Desa Gondanglegi Kulon terletak di ibukota kecamatan, yang berjarak kurang lebih 9 km sebelah selatan PG. Kreet Baru. Wilayah kerja KUD Raga Separéh meliputi satu kecamatan yang terdiri atas 23 desa dan 3 daerah kesinderan (afdeling).

Sarana perhubungan dari KUD Raga Separéh ke PG. Krebet Baru, dan ibu kota kabupaten maupun propinsi melalui jalan beraspal yang keadaannya cukup baik. Sedangkan sarana angkutan yang sering digunakan dalam pengangkutan tebu, adalah truk, loren, dan cikar.

c. 2. Topografi

Keadaan wilayah kerja KUD Raga Separéh sebagian besar terdiri dari daerah bertopografi datar, yaitu sebesar 90 persen, dan daerah berlereng kurang lebih sebesar 10 persen. Sedangkan ketinggiannya dari permukaan laut antara 350 meter sampai dengan 375 meter.

c. 3. Penggunaan Lahan

Pola penggunaan lahan di wilayah kerja KUD Raga Separéh terdiri dari lahan untuk pertanian dan lahan untuk non pertanian. Lahan pertanian terdiri dari lahan sawah, pekarangan, tegalan dan perkebunan. Sedangkan lahan sawah dibedakan atas lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan setengah teknis, luasan masing-masing penggunaan lahan tersebut seperti terlihat pada tabel 7.

Pada tabel 7, terlihat bahwa pola penggunaan lahan untuk pertanian lebih besar dari pada lahan untuk non pertanian. Luas lahan untuk pertanian adalah sebesar 12.207,03 hektar atau sebesar 95,14 persen. Sedangkan lahan untuk non pertanian adalah sebesar 624,10 hektar atau sebesar 4,86 persen.

Dari luasan lahan pertanian tersebut di atas, paling besar adalah pada sawah dengan pengairan setengah teknis yaitu sebesar 4.192,10 hektar atau 32,67 persen. Dan kemudian berturut-turut pada tegalan sebesar 3.375,99 hektar atau 26,31 persen, perkebunan sebesar 1.823,40 hektar atau 14,21 persen, pekarangan sebesar 1.505,00 hektar atau 11,73 persen, dan paling kecil pada sawah dengan pengairan teknis yaitu sebesar 1.310,54 hektar atau 10,21 persen.

Tabel 7. Tata Guna Lahan di Wilayah KUD Raga Separéh Tahun 1982.

Pola Penggunaan Lahan	Luas Areal (Hektar)	Persentase
1. Lahan Pertanian :		
a. Sawah Pengairan Teknis	1.310,54	10,21
b. Sawah Pengairan Setengah Teknis	4.192,10	32,67
c. Tegalan	3.375,99	26,31
d. Pekarangan	1.505,00	11,73
e. Perkebunan	1.823,40	14,21
2. Lahan Non Pertanian	624,10	4,86
J u m l a h	12.831,13	100,00

Sumber : KUD Raga Separéh

c. 4. Keadaan Penduduk

Keadaan penduduk di wilayah kerja KUD Raga Separéh se-
bagian besar adalah beragama Islam, kecuali di Desa Suwaru,
yaitu 90 persen beragama Kristen Protestan.

Pada akhir tahun 1979 keadaan jumlah penduduk di wila-
yah kerja KUD Raga Separéh adalah sebesar 107.035 jiwa,
dengan jumlah kepala keluarga sebesar 22.451 KK.

Jika dilihat pada tingkat pendidikannya maka sebesar
13.235 jiwa tidak menikmati bangku sekolah, dan sebesar
11.915 jiwa menikmati bangku sekolah. Dari sebesar 11.915
jiwa yang menikmati bangku sekolah ternyata sebagian besar
hanya tamat sekolah dasar (SD) yaitu sebesar 11.327 jiwa.
Sedangkan yang tamat sekolah menengah pertama (SMP) adalah
sebesar 342 jiwa, dan tamat sekolah menengah atas (SMA) se-
besar 234 jiwa, serta hanya sebesar 12 jiwa tamat perguruan
tinggi, hal ini seperti terlihat pada tabel 8.

Tabel 8. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Di Wilayah Kerja KUD Raga Separéh, tahun 1979.

Uraian	Jumlah Jiwa
Tidak Sekolah	13.235
Tamat SD/Sederajat	11.327
Tamat SMP/Sederajat	342
Tamat SMA/Sederajat	234
Tamat Perguruan Tinggi	12

Sumber : Kantor Kecamatan Gondanglegi.

2. Ditaring mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.
 a. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar IPB University.
 b. Pengutipan tidak mengizinkan kepenggunaan yang wajar IPB University.

IPB University
 Institut Pertanian Bogor



III. FUNGSI DAN PERANAN KUD RAGA SEPARIH DALAM PENGEMBANGAN USAHATANI TEBU RAKYAT

Peranan KUD Raga Separoh dalam pengembangan usahatani tebu rakyat merupakan salah satu fungsi KUD untuk pengembangan berbagai kegiatan ekonomi di wilayah unit desa. Dalam hal ini KUD mempunyai fungsi dan peranan untuk menciptakan kerjasama yang erat antara pabrik gula dengan kelompok tani tebu rakyat atau petani tebu rakyat baik sebagai anggota atau bukan anggota KUD, dalam rangka alih pengalaman dan teknologi.

Maksud pemerintah dengan memberikan peranan kepada KUD di dalam menangani pelaksanaan program tebu rakyat intensifikasi (TRI), adalah (1) Untuk mengusahakan agar pendapatan petani tebu dapat terjamin dan bahkan dapat meningkat terus, serta (2) Untuk membantu permodalan KUD agar dapat meningkatkan organisasi secara lebih cepat.

Telaahan fungsi dan peranan KUD ini dilakukan untuk menelaah sejauh mana keterlibatan KUD dalam pengembangan usahatani tebu rakyat, khususnya peranan dan kedudukan KUD dalam (1) Organisasi dan tata kerja pelaksanaan TRI, (2) Penyediaan dan pengaturan areal, (3) Pelayanan kredit dan sarana produksi, dan (4) Penebangan dan pengangkutan tebu.

III. 1. Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan TRI

Organisasi dan tata kerja pelaksanaan TRI dapat digolongkan dalam dua tingkatan, yaitu (a) Organisasi pengaturan dan pembinaan, dan (b) Organisasi di tingkat petani.

Organisasi pengaturan dan pembinaan merupakan hubungan kerja antar instansi pelaksana sistem TRI, sedangkan organisasi di tingkat petani merupakan pengorganisasian peserta TRI dalam hal tata cara pengusahaan tebu oleh petani.

III. 1. a. Organisasi Pengaturan dan Pembinaan

Agar pelaksanaan program TRI dapat berjalan dengan lancar maka struktur organisasi untuk pelaksanaan program TRI di atur sebagai berikut :

1. Di tingkat pusat oleh Satuan Pengendali BIMAS, ditambah dengan :
 - pejabat dari Dirjen Perkebunan
 - pejabat dari Dirjen Agraria
 - Staf bina perusahaan negara Departemen Pertanian
 - Bank Bumi Daya
 - Badan Pendidikan dan Penyuluhan Pertanian
 - Sekretaris Menteri Muda Koperasi
2. Di Daerah Tingkat II oleh Satuan Pembina BIMAS, ditambah dengan :
 - pejabat dari Dinas Perkebunan
 - Inspeksi Wilayah PN/PT Perkebunan
 - Direktorat Agraria di Propinsi Dati I
 - Pejabat dari Perusahaan Gula (PNP/PTP maupun non PNP/PTP) di tingkat Dati I
3. Di Daerah Tingkat II oleh Satuan Pelaksana BIMAS ditambah dengan :
 - pejabat dari Dinas Perkebunan



- Kantor Agraria Kabupaten Dati II
- Pabrik Gula di Kabupaten Dati II
- Pusat Pelayanan Koperasi (PPK)

Bagan selengkapnya dari organisasi yang menangani pelaksanaan program TRI di Dati II Kabupaten Malang, seperti terlihat pada gambar 3.

Pada bagan tersebut terlihat bahwa Bupati Kepala Dati II bertindak sebagai ketua Satpel BIMAS Kabupaten Malang, sedangkan pengelola harian pada masing-masing tingkat adalah :

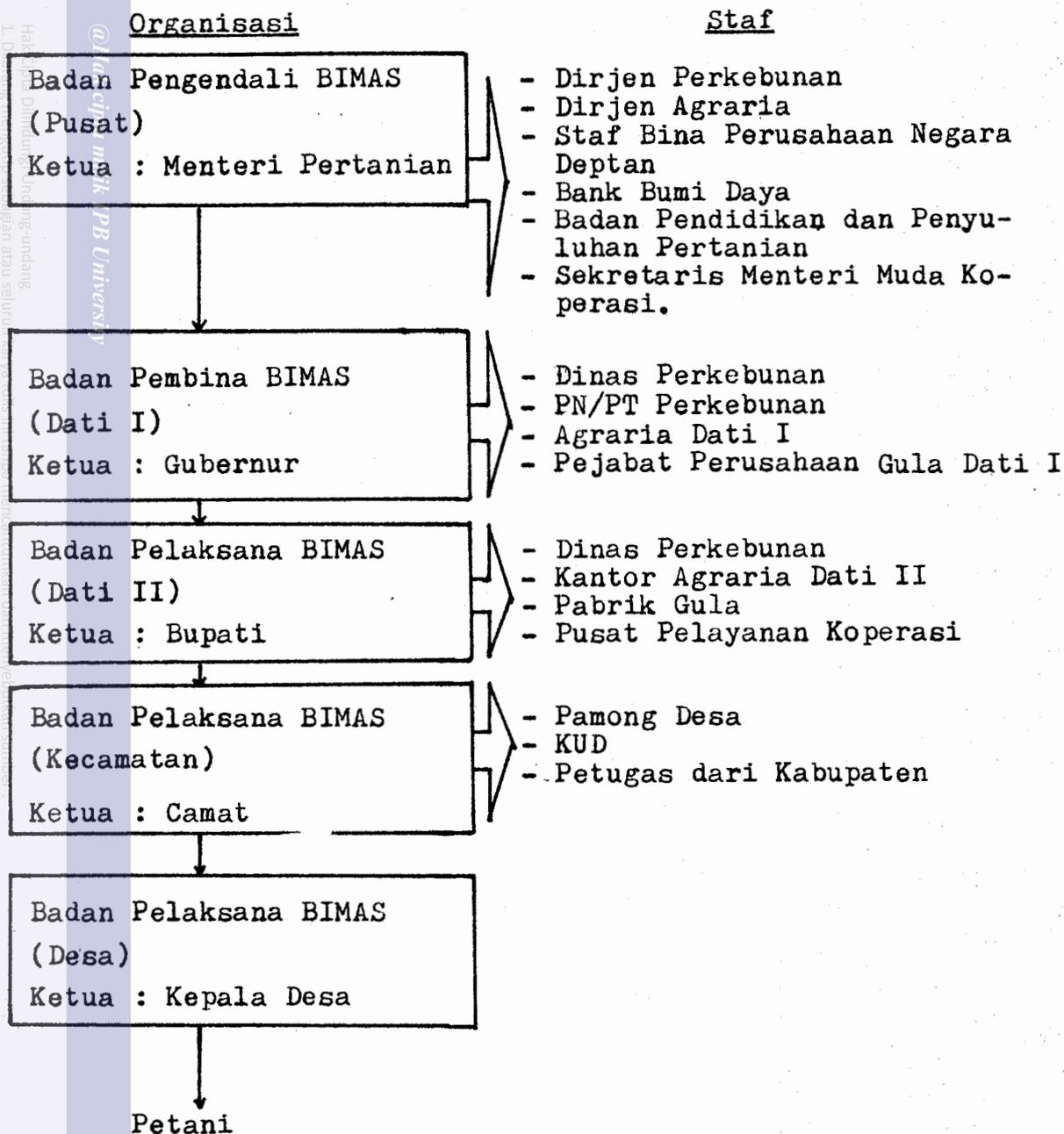
Kepala Dinas Perkebunan Dati II di tingkat Kabupaten, Kepala Satpel BIMAS Kecamatan di tingkat Kecamatan dan Kepala Satpel BIMAS Desa di tingkat Desa. Sedangkan KUD Raga Separéh adalah salah satu subsistem dalam sistem TRI di tingkat Kecamatan Gondanglegi.

Peranan KUD Raga Separéh dalam pembinaan dan bimbingan kepada petani tebu dalam bentuk penyuluhan menunjukkan hasil yang cukup baik. Yaitu 68,18 persen petani tebu memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan penyuluhan sering dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan, sedangkan 31,82 persen petani memberikan tanggapan sebaliknya, seperti terlihat pada tabel 9.

Tabel 9. Tanggapan Petani Tebu Terhadap Program Penyuluhan Yang Dilaksanakan Oleh KUD Raga Separéh.

Tanggapan Petani	Jumlah Petani	Persentase
Sering dan Mengena	15	68,18
Jarang dan Tidak mengena	7	31,82
Jumlah	22	100,00

Gambar 3. Bagan Organisasi Pelaksana TRI di wilayah kerja PG. Krebbe Baru.



III. 1. b. Organisasi di Tingkat Petani

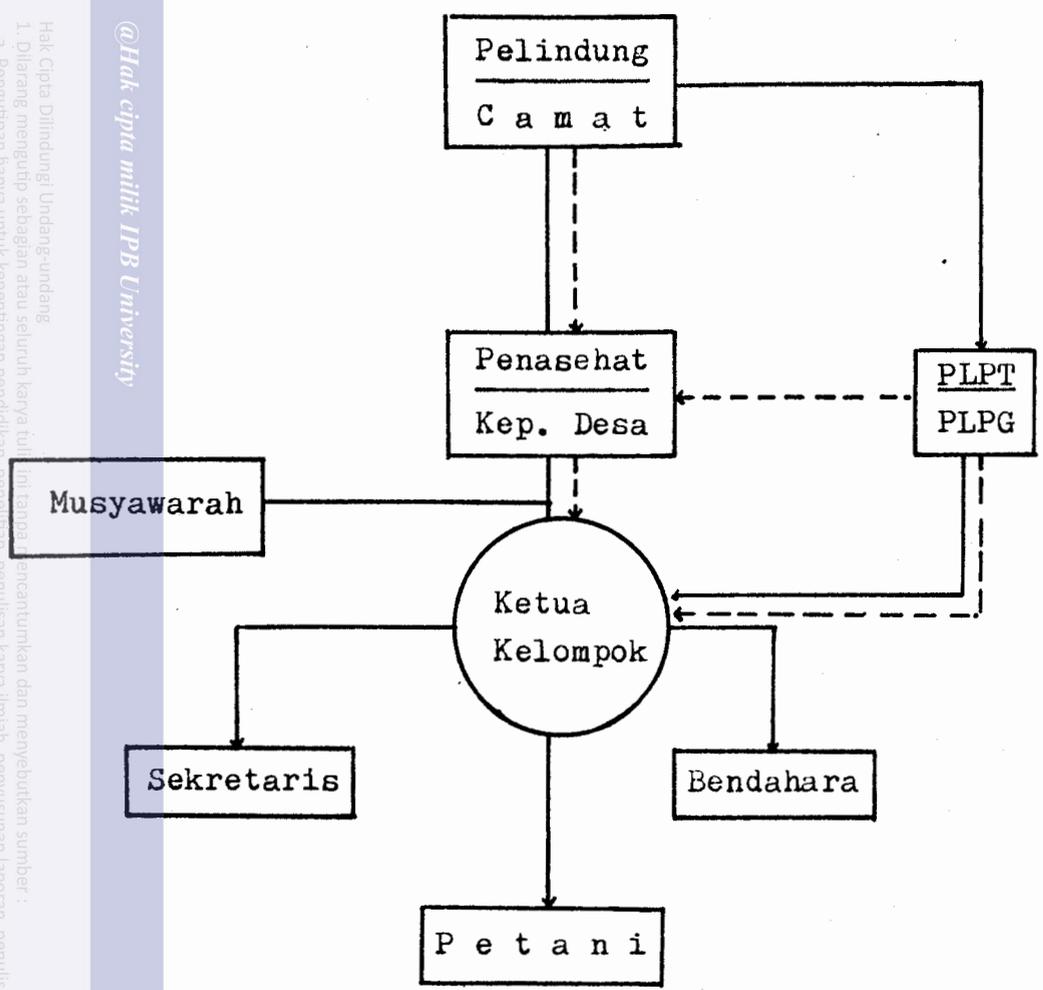
Petani peserta TRI di wilayah PG. Krebet Baru telah di koordinasi dalam wadah KUD. Untuk memudahkan pelaksanaan bimbingan maka KUD membentuk kelompok tani tebu.

Pembentukan kelompok tani tebu pada hakekatnya bertujuan untuk: (a) menyatukan pemilik tanah dalam satu hamparan, (b) menyatukan pemilik tanah dalam hubungan kultur teknis, (c) mempermudah pembinaan, serta (d) memperjuangkan hak dan kewajiban anggota kelompok.

Suatu kelompok tani tebu dipimpin oleh ketua kelompok yang dipilih dari dan oleh petani anggota kelompok. Sedangkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh ketua kelompok, adalah dapat membaca dan menulis, petani pemilik/penggarap, jujur dan sanggup memimpin. Ketua kelompok terpilih harus disetujui dalam musyawarah desa dan disahkan oleh Camat. Jika dilihat kedudukan ketua kelompok terhadap Camat, Kepala Desa, dan petani, maka seperti terlihat pada gambar 4.

Adapun tugas ketua kelompok secara garis besar adalah melaksanakan pendaftaran peserta TRI dengan menyiapkan daftar calon (daftar "nominatif") petani TRI, mengkoordinasi pekerjaan dilapang, mengawasi penerimaan dan pemakaian kredit, serta memberikan pelayanan kepada anggota dalam hal penyaluran pupuk dan penyelesaian nota perhitungan gula dari KUD. Sedangkan dana untuk jasa ketua kelompok dan pengurus ditetapkan berdasarkan rapat anggota KUD, yaitu sebesar Rp.5 - per kwintal tebu dan diberikan pada akhir giling.

Gambar 4. Bagan Struktur Organisasi Kelompok tani Tebu Di Wilayah KUD Raga Separéh



Keterangan :

- = Garis Komando
- - - - - = Garis Pembinaan

Sumber : KUD Raga Separéh

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber ;
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Berdasarkan tugas ketua kelompok di depan, maka petani bebas melaksanakan pengelolaan usahatannya secara individual. Pada tabel 10, terlihat bahwa 81,81 persen petani tebu di wilayah KUD Raga Separéh ikut mengerjakan usahatannya dan 18,19 persen petani tidak ikut mengerjakan, artinya semua pekerjaan diburuhkan.

Tabel 10. Keikutsertakan Petani Dalam Mengelola Usahatani di Wilayah KUD Raga Separéh.

Keterangan Petani	Jumlah Petani	Persentase
Ikut mengerjakan	18	81,81
Tidak ikut mengerjakan	4	18,19
Jumlah	22	100,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Dengan keterangan tersebut di atas maka bentuk kelompok tani tebu di wilayah KUD Raga Separéh dapat digolongkan dalam bentuk kelompok koordinatif, artinya pengurus kelompok bertindak sebagai koordinasi dan penghubung antar kegiatan kelompok serta mengurus sarana produksi dan kredit yang diperlukan oleh petani anggota kelompok.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa peranserta petani anggota terhadap kelompoknya cukup besar. Pada tabel 11, terlihat bahwa semua anggota kelompok mempunyai hak dan wewenang untuk memberikan suara dalam pengambilan keputusan. Sedangkan pada tabel 12,



terlihat bahwa 95.95 persen petani anggota kelompok selalu hadir jika diadakan pertemuan oleh kelompok. Tetapi yang ikut berperan dalam membuat rencana bersama sebesar 81,81 persen, dan yang membahas masalah bersama sebesar 77,27 persen dari petani anggota kelompok yang hadir. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pendidikan dan pengalaman mengelola usahatani tebu yang berlainan.

Tabel 11. Anggota Kelompok yang Mempunyai Hak dan Wewenang Dalam Mengambil Keputusan.

Keterangan	Jumlah Petani	Persentase
Semua Anggota	22	100
Anggota Tertentu	0	0
Pengurus	0	0
Ketua Kelompok	0	0

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Tabel 12. Tingkat Peranserta Petani Anggota Kelompok Terhadap Kegiatan Kelompok

Peranserta Anggota Dalam	Jumlah Petani Responden	Jumlah Petani yang ikut	Persentase
Membuat Rencana bersama	22	18	81,81
Membahas Masalah	22	17	77,27
Mengikuti Pertemuan	22	21	95,95

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer.

Bila diikuti maka perkembangan kelompok koordinatif di wilayah KUD Raga Separéh ternyata mengalami kecenderungan yang meningkat, baik jumlah kelompok, jumlah anggota maupun luas areal.

Pada tabel 13, terlihat bahwa dari tahun 1980/1981 sampai dengan tahun 1982/1983 kenaikan jumlah kelompok rata-rata adalah sebesar 8,5 kelompok per tahun atau sebesar 26,22 persen per tahun. Jumlah anggota terjadi kenaikan rata-rata sebesar 2.850,50 anggota per tahun atau sebesar 47,30 persen per tahun, sedangkan luas areal kelompok mengalami kenaikan rata-rata sebesar 1.242,83 hektar per tahun atau sebesar 46,40 persen per tahun.

Tabel 13. Perkembangan Jumlah Kelompok, Jumlah Anggota dan Luas Areal Pada Tahun 1980/1981-1982/1983 di Wilayah KUD Raga Separéh.

Tahun	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota	Luas Areal (Ha)
1980/1981	29	5.261	2.222,77
1981/1982	39	9.294	2.904,35
1982/1983	46	10.962	4.707,43

Sumber : KUD Raga Separéh

III. 2. Penyediaan dan Pengaturan Areal

Pada dasarnya sejak pelaksanaan INPRES No. 9 tahun 1975, PG. Kerebet Baru tidak mempunyai areal untuk pertanaman tebu. Sehingga kebutuhan bahan baku tebu dipenuhi dari areal tebu rakyat. Untuk menjamin ketersediaan areal bagi tanaman tebu di Kabupaten Malang, maka bupati selaku ketua Satpel BIMAS menetapkan luas areal yang harus ditanami tebu.

Jumlah realisasi tebu rakyat dari tahun ke tahun semakin meningkat sesuai dengan meningkatnya kapasitas giling pabrik gula, seperti terlihat pada tabel 14 .

Tabel 14 . Perkembangan target dan realisasi luas areal tanaman TRI di wilayah PG. Kerebet Baru, tahun 1975/1976-1982/1983.

Tahun	Target (ha)	Realisasi (ha)	Persentase Realisasi
1975/1976	4.500	2.656,70	59,04
1976/1977	3.900	3.234,64	82,94
1977/1978	4.752	3.743,15	78,77
1978/1979	9.250	8.519,00	92,09
1979/1980	9.250	9.651,421	103,94
1980/1981	9.250	9.280,97	100,33
1981/1982	12.750	11.679,30	91,60
1982/1983	12.750	14.822,74	116,26

Sumber : Bagian Tanaman PG. Kerebet Baru (Diolah kembali)

Bila diikuti perkembangan luas areal TRI di wilayah KUD Raga Separih sejak tahun 1980/1981 sampai dengan tahun 1983/1984 ternyata secara rata-rata mengalami kenaikan setiap tahunnya, yaitu sebesar 410,43 hektar atau 17,36 persen. Luas areal program TRI di wilayah KUD Raga Separih pada kenyataannya lebih luas pada sistem TRIS II dari pada TRIS I, dan juga lebih luas pada sistem TRIT II dari pada TRIT I, artinya sistem penanaman dengan melalui keprasan lebih banyak dari pada sistem tanaman pertama. Dan secara keseluruhan luas areal usahatani tebu di lahan sawah (TRIS I dan TRIS II) lebih luas dari pada areal usahatani di lahan tegalan (TRIT I dan TRIT II), seperti terlihat pada tabel 15.

Tabel 15. Perkembangan Luas areal TRI di wilayah KUD Raga Separih pada tahun 1980/1981-1983/1984.

Tahun	TRIS I	TRIS II	TRIT I	TRIT II	Jumlah
----- Hektar -----					
1980/1981	312,700	1.412,625	308,900	674,035	2.780,250
1981/1982	480,625	1.120,000	520,125	783,600	2.904,350
1982/1983	674,500	1.926,250	380,200	1745,925	4.726,875
1983/1984	860,250	1.815,100	416,100	919,600	4.011,600

Sumber : KUD Raga Separih

Kenaikan luas areal TRI di wilayah KUD Raga Separéh tersebut di atas, disebabkan karena anggapan petani terhadap usahatani tebu yang lebih menguntungkan dari pada usahatani selain tebu. Sehingga mendorong petani dengan kesadarannya sendiri untuk mendaftarkan arealnya menjadi peserta TRI. Hal ini dapat dilihat pada tabel 16, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapang menunjukkan bahwa 100 persen dari petani responden memberi tanggapan bahwa menjadi peserta TRI atas dasar yakin kalau tanaman tebu lebih menguntungkan dari pada tanaman lainnya. Anggapan tersebut disebabkan karena latar belakang pengalaman petani tebu di wilayah KUD Raga Separéh cukup lama yaitu rata-rata sudah menanam tanaman tebu selama 13,17 tahun.

Tabel 16. Penyebaran Alasan Petani Ikut Serta Dalam Program TRI di wilayah KUD Raga Separéh.

Alasan Petani	Jumlah petani Responden	Persentase
Ingin mencoba menanam tebu sebagai usaha baru	0	0
Ditunjuk	0	0
Sudah yakin usaha tebu lebih menguntungkan dari pada tanaman lain	22	100,00
Karena memperoleh kredit	0	0
Jumlah	22	100,00

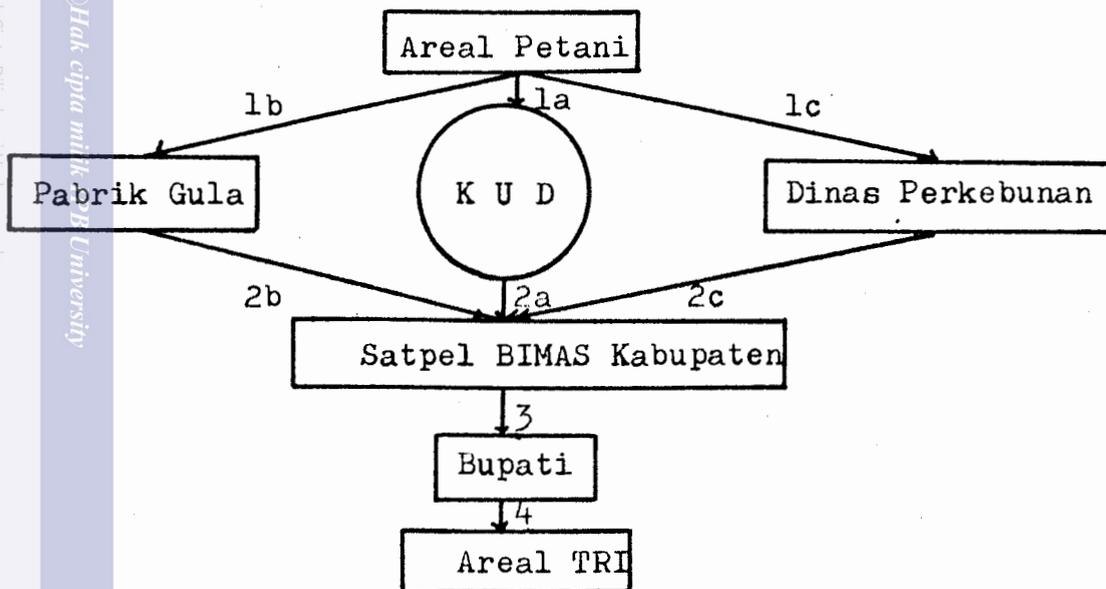
Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Berdasarkan keterangan di depan ternyata masalah areal di wilayah PG. Kreet Baru khususnya wilayah KUD Raga Separéh berbeda dengan di wilayah pabrik gula lainnya. Sebab masalah areal bagi wilayah KUD Raga Separéh bukanlah hal yang menyulitkan, sehingga hal ini akan menjamin persediaan bahan baku bagi pabrik gula. Tidak ada kesulitan masalah areal ini disebabkan karena di wilayah KUD tersebut sebelum program TRI dilaksanakan, petani sudah terbiasa menanam tebu untuk digiling ke PG. Kreet Baru.

Setelah adanya INPRES No. 9 tahun 1975, maka areal tebu yang dikelola petani secara resmi harus tercatat dan mempunyai kedudukan sebagaimana seperti tercantum pada syarat-syarat areal TRI, yang diatur berdasarkan SK. Mentan No. 002 tahun 1981. Berdasarkan hal tersebut syarat-syarat peserta TRI adalah, (a) pemilik tanah yang mengusahakan tebu pada tanahnya sendiri, (b) pemegang bengkok atas sebidang tanah yang mengusahakan tanaman tebu, dan (c) penggarap yang diberi kuasa oleh pemilik tanah sendiri tidak lebih dari dua hektar. Sedangkan perorangan atau gabungan orang yang mengusahakan tanaman tebu pada tanah milik orang lain yang disewa tidak diperkenankan ikut serta dalam program TRI.

Berdasarkan keterangan di atas maka sejak keluarnya SK. Mentan tersebut, petani tebu di wilayah KUD Raga Separéh mengajukan pendaftaran areal tebunya supaya tercatat sebagai peserta program TRI, proses pengajuan areal seperti terlihat pada gambar 5.

Gambar 5. Bagan Proses Pengajuan Areal Petani Untuk Menjadi Peserta TRI, Di Wilayah KUD Raga Separih.



Keterangan :

- 1a. = KUD mendaftarkan areal tebu yang akan dijadikan areal TRI.
- 1b. = Pabrik Gula Mendaftarkan areal tebu yang akan dijadikan areal TRI.
- 1c. = Dinas Perkebunan mendaftarkan areal tebu yang akan dijadikan areal TRI.
- 2a, 2b, 2c. = KUD, Pabrik Gula, Dinas Perkebunan masing-masing melaporkan hasilnya kepada Satpel BIMAS Kabupaten
3. = Satpel BIMAS Kabupaten mengolah dan merumuskan laporan dari KUD, Pabrik Gula dan Dinas Perkebunan, dan menyampaikan hasilnya kepada Bupati selaku Ketua Satpel BIMAS Kabupaten.
4. = Bupati menerima laporan dan membuat usulan areal TRI untuk tiap desa, tiap kecamatan kepada Gubernur Jawa Timur, dan Gubernur membuat usulan ke menteri dalam negeri.

III. 3. Pelayanan Kredit dan Sarana Produksi

Kredit yang disediakan bagi petani TRI adalah kredit modal kerja permanen (KMKP) massal. Oleh karena itu kredit ini disalurkan oleh BRI kepada petani melalui KUD dengan bunga 12 persen per tahun, termasuk 3 persen untuk dana pengembangan KUD, dengan demikian bunga efektif yang diterima oleh BRI sebesar 9 persen per tahun.

Kredit yang disediakan oleh BRI pada prinsipnya bertujuan, (1) untuk membiayai pertanaman tebu yang dilakukan oleh petani peserta TRI, dan (2) untuk membiayai sarana produksi pertanian yang diperlukan oleh petani peserta TRI.

Berdasarkan hal tersebut di atas pemberian kredit modal kerja untuk pertanaman tebu mempunyai fungsi ganda, yaitu (1) untuk menjamin tersedianya tebu sebagai bahan baku bagi pabrik gula, dan (2) untuk meningkatkan pendapatan petani peserta TRI dengan memungkinkan mengusahakan penanaman tebu oleh petani sendiri.

Paket kredit untuk wilayah KUD Raga Separéh tersedia dalam bentuk paket A, B dan C. Paket A untuk tanaman pertama (TRI I) dan paket B untuk tanaman keprasan (TRI II), sedangkan paket C untuk petani TRP. Kredit diberikan dalam dua bentuk yaitu, bentuk tunai dan giral. Bentuk tunai yaitu untuk biaya garapan, pemeliharaan tanaman, biaya tebang dan angkut serta bantuan biaya hidup (BBH). Sedangkan bentuk giral untuk, kebutuhan sarana produksi yang terdiri dari bibit, pupuk serta obat pemberantasan hama dan penyakit.

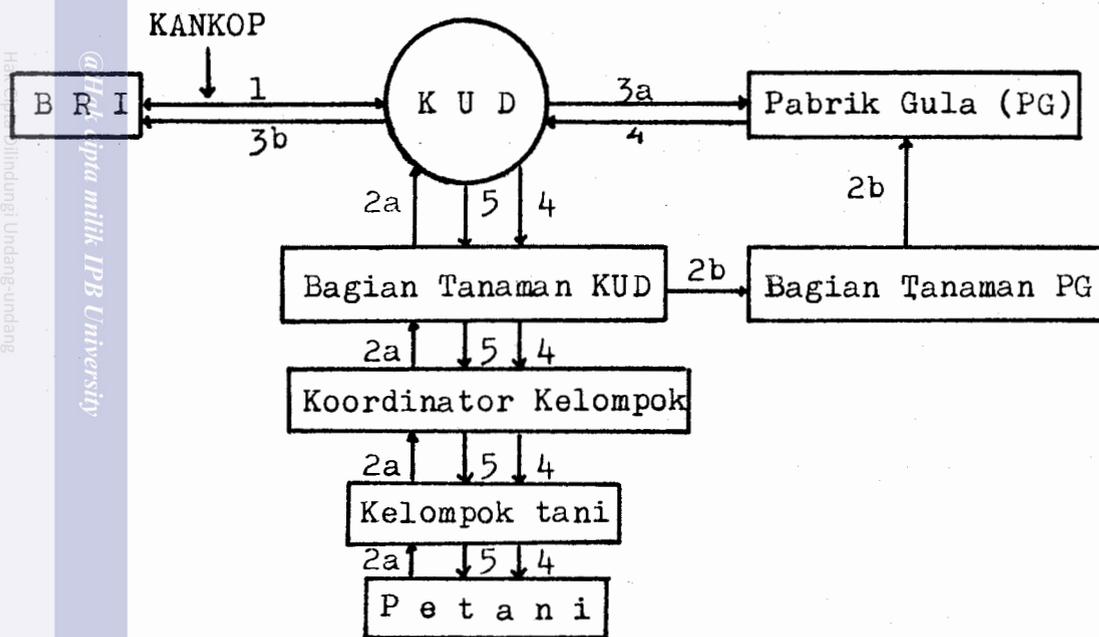
Di wilayah KUD Raga Separéh, secara keseluruhan kredit yang diberikan terbagi dalam tiga tahap, tetapi yang diberikan secara langsung kepada petani hanya dua tahap. Tahap pertama, yaitu untuk biaya penggarapan, biaya bibit dan biaya bantuan hidup. Tahap kedua, yaitu biaya pemeliharaan dan biaya bantuan hidup. Sedangkan tahap ketiga yang berupa biaya tebang dan angkut tidak diambil oleh petani sendiri melainkan secara keseluruhan dikelola oleh KUD dan pabrik gula.

Pengambilan kredit kepada BRI dilaksanakan melalui KUD setelah tebang terakhir. Pembayaran langsung dengan memotong hasil penjualan gula bagian petani oleh KUD yang bersangkutan.

Berdasarkan keterangan yang didapatkan dari petani tebu, petugas KUD, dan petugas pabrik gula, masalah yang sering terjadi pada kredit adalah terlambatnya realisasi. Hal ini sebagai akibat prosedur yang cukup rumit, seperti terlihat pada gambar 6. Akibat lebih lanjut dari terlambatnya realisasi kredit ini ialah petani terpaksa mengeluarkan biaya sendiri untuk tahap awal pembiayaan usahatannya.

Bila diikuti perkembangan realisasi kredit di wilayah KUD Raga Separéh untuk usahatani TRI mengalami kecenderungan yang menaik, yaitu untuk musim tanam tahun 1980/1981 sampai dengan tahun 1982/1983 mengalami kenaikan rata-rata sebesar Rp. 986,50 juta. Hal ini disebabkan karena adanya kenaikan pada luas areal TRI yang terealisasi pada tahun tersebut, seperti terlihat pada tabel 17.

Gambar 6. Bagan Prosedur Perkreditan Dalam Program TRI di wilayah KUD Raga Separih.



Keterangan :

1. KUD akad kredit pada BRI dengan rekomendasi KANKOP sesuai dengan kebutuhan
- 2a. Petani mendaftarkan tebunya untuk mendapatkan kredit dengan mengisi blanko 89 B, diketahui kelompok tani, koordinator kelompok dan kepala desa, kemudian diserahkan kepada bagian tanaman KUD.
- 2b. Bagian tanaman KUD menghubungi bagian tanaman PG untuk mengadakan pemeriksaan kebun dan melaporkan hasil pemeriksaannya kepada KUD dan PG.
- 3a. KUD menyampaikan pendaftaran ke PG untuk mendapatkan pupuk dengan disertai surat perintah pembayaran (SPP) sarana produksi.
- 3b. KUD menyampaikan pendaftaran ke BRI untuk mendapatkan paket kredit dengan disertai rekap SPP paket dan rekomendasi dari PG.
4. PG menyerahkan pupuk pada KUD dan diteruskan kepada petani.
5. KUD membuat SPP paket kredit diberikan kepada petani.

Tabel 17. Perkembangan Realisasi Kredit dan Luas Areal TRI di wilayah KUD Raga Separéh MT. 1980/1981-1983/1984

Tahun	Kredit (Juta Rupiah)	Luas Areal TRI (Hektar)
1980/1981	46	2.222,765
1981/1982	1.142	2.904,350
1982/1983	2.019	4.707,425
1983/1984 ¹⁾	809	4.011,600

Keterangan : 1) Musim Giling Sedang Berjalan

Sumber : KUD Raga Separéh

Untuk mewujudkan peranan KUD dalam hal memberikan pelayanan sarana produksi kepada petani tebu TRI, maka sejak musim tanam 1981/1982 KUD Raga Separéh telah memberikan pelayanan sarana produksi berupa pupuk dan obat-obatan. Sedangkan untuk bibit, karena KUD kurang mampu untuk menanganinya maka penyediaan bibit dilakukan oleh pabrik gula.

Jika diperhatikan pada tabel 18, terlihat bahwa belum 100 persen petani tebu mendapatkan pelayanan pupuk dan obat-obatan berasal dari KUD. Untuk sarana produksi pupuk menunjukkan sebesar 54,54 persen petani mendapatkan pelayanan berasal dari KUD, sedangkan 45,46 persen petani mendapatkan pelayanan berasal dari toko atau kios swasta. Hal ini disebabkan karena pengadaan pupuk oleh KUD sering terjadi keterlambatan, sedangkan tanaman sudah waktunya dipupuk,

sehingga untuk memenuhinya sebagian petani membeli pupuk di luar KUD, yaitu di toko atau kios swasta.

Untuk sarana produksi obat-obatan, menunjukkan sebesar 63,64 persen petani mendapatkan pelayanan dari KUD, sedangkan 36,36 persen petani mendapatkan pelayanan berasal dari toko atau kios swasta. Hal ini yang terutama disebabkan karena kesadaran petani sebagai anggota KUD masih kurang, sehingga biarpun tidak ada keterlambatan tetapi masih ada petani yang membeli di luar KUD walaupun dengan harga yang sama.

Tabel 18. Sumber Petani dalam memenuhi kebutuhan sarana produksi pada usahatani TRI tahun tanam 1983/1984 di wilayah KUD Raga Separéh.

Jenis sarana produksi	KUD	Kelompok tani/petani lain	%		
			Toko/kios swasta	Pabrik Gula	Petani Sendiri
Bibit	-	65	-	35	-
Pupuk	54,54	-	45,46	-	-
Obat-obatan	63,64	-	36,36	-	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Untuk bibit ternyata menunjukkan bahwa hanya sebesar 35 persen berasal dari pabrik gula, sedangkan 65 persen berasal dari petani lain tetapi masih dalam kelompok taninya. Hal ini disebabkan karena petani lebih senang membeli bibit antar petani yang harganya relatif lebih murah.

III. 4. Penebangan dan Pengangkutan Tebu

Dalam kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, KUD sesuai dengan peranannya adalah sebagai pengkoordinasi dan mengawasi pelaksanaan penebangan dan pengangkutan tebu tersebut sampai di pabrik gula.

Sebelum diadakan penebangan, pabrik gula harus membuat jadwal penebangan. Jadwal tebang tersebut disusun berdasarkan hasil analisa kemasakan tebu dari setiap lokasi tebu yang dibimbingnya dan disesuaikan dengan kapasitas giling pabrik.

Biaya tebang dan angkut dari kebun sampai ke tempat timbangan pabrik gula menjadi tanggungan petani. Sedangkan dalam pelaksanaannya semua biaya tebang dan angkut diberikan kredit oleh BRI yang pemakaiannya dikelola oleh pabrik gula. Biaya ini nantinya akan dibebankan kepada nota gula masing masing petani.

Di wilayah KUD Raga Separéh, pengangkutan tebu dari lapangan ke emplasemen lalu sampai ke pabrik gula dapat dilakukan dengan berbagai cara. Alat angkut yang digunakan terdiri dari truk, lori dan cikar. Pengangkutan ada yang hanya dilakukan dengan truk saja, dengan lori saja dan dengan cikar saja atau kombinasi antara cikar dengan lori dan kombinasi antara cikar dengan truk.

Biaya tabang dan angkut besarnya berbeda-beda, disesuaikan dengan alat angkut yang digunakan. Jika dilihat pada tabel 19, maka menunjukkan bahwa biaya dengan menggunakan

cikar lebih mahal jika dibandingkan dengan memakai loren ataupun truk. Untuk tebang dan angkut memakai cikar biayanya sebesar Rp. 278,25 per kwintal tebu, lebih besar jika dibandingkan dengan memakai truk yaitu sebesar Rp. 243 per kwintal tebu dan memakai loren sebesar Rp. 220,25 per kwintal tebu. Keadaan tersebut disebabkan karena pengangkutan dengan cikar hanya sampai pada emplasemen pembantu di kebun atau rel utama, selanjutnya dipindahkan ke lori untuk dikirim ke pabrik gula.

Tabel 19. Perincian Biaya Tebang dan Angkut per Kwintal tebu di wilayah KUD Raga Separéh tahun 1983.

Keterangan Biaya	Loren	Truk	Cikar
Tebang	60	70	70
Angkut	130	150	130
Pengawas desa	1,50	1,50	1,50
Kelompok	5	5	5
Mandor	7,25	12	7,25
YPA/Madrasah	1,50	1,50	1,50
Biaya sapen s/d 300 ram, selebihnya tambah Rp.2	12	-	-
Biaya cikar	-	-	60
Biaya lain-lain	3	3	3
J u m l a h	220,25	243	278,25
Subsidi dari PG	45,00	65	45,00
Jumlah biaya bersih	175,25	178	233,25

Sumber : KUD Raga Separéh.

Untuk membantu petani meringankan biaya pengangkutan maka pabrik gula Kreet Baru memberikan bantuan (subsidi) yang besarnya berbeda-beda menurut alat pengangkutan yang digunakan. Untuk tebu yang diangkut dengan cekar mendapat bantuan sebesar Rp. 45,- per kwintal tebu, tebu yang diangkut dengan truk mendapat bantuan sebesar Rp. 65,- per kwintal tebu, sedangkan tebu yang diangkut dengan loren mendapat bantuan sebesar Rp.45,- per kwintal tebu. Bantuan ini diserahkan langsung kepada petani yang dikoordinasi oleh KUD yang disesuaikan dengan perjanjian kontrak giling.

Berdasarkan keterangan diatas ternyata setelah adanya bantuan biaya pengangkutan jumlah biaya bersih menjadi berkurang . Tetapi komposisi besarnya biayapada masing-masing alat angkut adalah tetap, yaitu biaya pengangkutan untuk cekar tetap paling tinggi dibandingkan biaya pengangkutan dengan truk maupun loren.



IV. ANALISA PENDAPATAN USAHATANI TEBU DAN NON TEBU

Keterkaitan sasaran-sasaran INPRES No. 9 tahun 1975 patut diperhatikan, mengingat sasaran itu sebenarnya merupakan suatu sistem. Analisa pendapatan sebagai subsistem merupakan bagian yang cukup penting dari suatu usahatani, mengingat pendapatan sebagai salah satu kriteria untuk melihat apakah menguntungkan atau tidak suatu polahatani baik terhadap keluarga petani maupun secara nasional.

Pendapatan adalah merupakan suatu konsep ekonomi, sedangkan prinsip ekonomi selalu menunjukkan pada bentuk pilihan. Petani sebagai pelaku ekonomi selalu menghadapi berbagai pilihan, dan akan berusaha memilih kegiatan yang dianggapnya paling menguntungkan. Dengan adanya berbagai pilihan maka analisa pendapatan sangat penting bagi petani dalam mengambil keputusan untuk menentukan pola tanam yang paling menguntungkan.

Analisa pendapatan usahatani ini dilakukan untuk menelaah, (1) Pendapatan petani dari hasil usahatani tebu dan (2) Pendapatan petani dari hasil usahatani non tebu. Telaahan ini dimaksudkan untuk membandingkan pendapatan per hektar petani yang mengusahakan tebu dan non tebu.

Dalam analisa pendapatan ini digunakan data dari petani contoh dimana sistem usahatani tebu sering dijumpai. Sistem usahatani yang sering dijumpai di wilayah kerja KUD Raga Separih untuk musim tanam 1982/1983 adalah tebu rakyat intensifikasi di lahan sawah (TRIS) maupun dilahan tegalan (TRIT).

Sedangkan sistem usahatani non tebu yang ada adalah pola tanam padi-padi-padi dan padi-padi-jagung. Pilihan lain selain mengusahakan tanahnya adalah dengan menyewakan tanah miliknya untuk diusahakan oleh orang lain, dan petani pemilik tanah hanya menerima pendapatan dari uang sewa tanah tersebut.

IV . 1. Analisa Pendapatan Usahatani Tebu

Setelah adanya sistem TRI, maka pendapatan petani yang dahulunya hanya tergantung pada nilai sewa tanah sekarang petani tebu mengelola tanahnya sendiri dan pendapatannya tergantung banyak faktor yang tunduk pada adanya berbagai resiko.

Pada dasarnya pendapatan usahatani adalah selisih antara penerimaan yang diperoleh dari suatu kegiatan usahatani dengan biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.

Penerimaan dari perusahaan tanaman tebu tergantung pada besarnya kristal gula dan tetes yang dihasilkan. Besarnya kristal gula ditentukan oleh besarnya tebu yang dihasilkan dan rendemen, sedangkan besarnya tetes tergantung pada besarnya tebu yang dihasilkan (1,5 kilogram tetes untuk setiap kwintal tebu).

Biaya merupakan penjumlahan dari semua biaya yang telah dikeluarkan, baik biaya untuk pengelolaan tanaman tebu di lapangan sampai tebang dan angkut, maupun biaya-biaya lain seperti : analisa, selamatan giling, alat-alat tulis

atau catatan, administrasi, biaya-biaya yang harus dibayar pada BRI dan balas jasa untuk ketua kelompok.

Untuk membantu petani tebu dalam segi permodalan, maka pemerintah melalui BRI memberikan bantuan berupa paket kredit. Besarnya paket kredit yang diberikan kepada petani tebu tergantung pada sistem usahatani tebunya. Untuk musim tanam tahun 1982/1983 besarnya paket kredit usahatani TRI di wilayah kerja PG. Kreet Baru, seperti terlihat pada tabel 20.

Pada tabel 20, terlihat bahwa besarnya paket kredit dibedakan dalam beberapa bentuk pembiayaan, yaitu biaya garap dan pemeliharaan, tebang dan angkut, serta bantuan biaya hidup (BBH) yang besarnya berbeda-beda untuk masing-masing sistem usahatani.

Sedangkan besarnya biaya garap dan pemeliharaan, bibit, pupuk serta biaya tebang dan angkut yang dikeluarkan oleh petani contoh TRIS I, TRIS II, TRIT I dan TRIT II untuk musim tanam tahun 1982/1983, seperti terlihat pada tabel 21.

Pada tabel 21, terlihat bahwa besarnya biaya yang dikeluarkan untuk setiap hektar pada usahatani TRIS I dan TRIS II maupun TRIT I dan TRIT II berbeda. Untuk usahatani TRIS I adalah sebesar Rp. 951.000,- lebih besar jika dibandingkan dengan TRIS II, TRIT I dan TRIT II yang masing-masing sebesar Rp. 711.000 untuk TRIS II, sebesar Rp. 720.400 untuk TRIT I dan sebesar Rp. 581.000 untuk TRIT II.

Jika dihubungkan tabel 20 dan 21, terlihat bahwa besarnya paket kredit yang diterima petani untuk usahatani TRIS I, TRIS II, TRIT I dan TRIT II tidak mencukupi kebutuhan

Tabel 20. Besar Paket Kredit Pada Usahatani TRIS dan TRIT per Hektar di Wilayah kerja Pg. Krebet Baru Muslim Tanam 1982/1983.

Sistem Usahatani	Garap/Pemeliharaan tanaman	Sarana Produksi		Tebang/Angkut	BBH	Total
		Bibit	Pupuk			
TRIS I	290.000	175.000	76.500	225.000	300.000	1.066.500
TRIS II	235.000	17.500	63.000	200.000	220.000	735.500
TRIT I	215.000	175.000	63.000	150.000	160.000	763.000
TRIT II	237.000	17.500	54.000	150.000	160.000	556.500

Sumber : Bagian Tanaman Pg. Krebet Baru

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Tabel 21. Biaya yang dikeluarkan pada Usaha tani TRIS dan TRIT per Hektar di Wilayah KUD Raga Separih MT 1982/1983.

Sistem Usaha tani	Garap/Pemeliharaan Tanaman	Sarana Produksi		Tebang/angkut	Total
		Bibit	Pupuk		
TRIS I	376.000	120.000	105.000	350.000	951.000
TRIS II	332.500	-	102.000	276.500	711.000
TRIT I	220.000	120.000	110.500	269.000	719.500
TRIT II	178.400	-	115.000	287.600	581.000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

usahatani. Besarnya pengeluaran tambahan petani sebagai akibat dari perbedaan antara paket kredit dengan pengeluaran sebenarnya, seperti terlihat pada tabel 22 .

Pada tabel 22 , terlihat bahwa secara umum biaya garap dan pemeliharaan, pupuk, biaya tebang dan angkut yang dikeluarkan petani TRIS I, TRIS II, TRIT I, dan TRIT II melebihi paket kredit yang diterimanya, hanya biaya untuk bibit yang tidak melebihi besarnya paket kredit yang telah ditentukan. Sedangkan biaya bibit dari paket kredit untuk TRIS II, dan TRIT II tidak digunakan dalam usahatani, yaitu sebesar Rp. 17.500,-. Tambahan biaya untuk setiap hektar dalam usahatani TRIS I, TRIS II, TRIT I dan TRIT II berbeda satu dengan lainnya. Tambahan biaya setiap hektar terbesar dikeluarkan oleh usahatani TRIS I yaitu sebesar Rp. 315.311,25 kemudian berturut-turut usahatani TRIS II sebesar Rp. 260.540 TRIT II sebesar Rp. 228.809 dan TRIT I sebesar Rp. 228.582. Adanya perbedaan antara paket kredit dan biaya yang sebenarnya tersebut kemungkinan karena paket yang diberikan kepada petani berlaku secara umum, sedangkan dalam kenyataannya ada perbedaan kualitas lahan, tarif setempat, tingkat ketrampilan dan jarak tempat.

Biaya total usahatani TRIS I, TRIS II, TRIT I dan TRIT II dalam wilayah KUD Raga Separoh dapat dilihat pada tabel 23. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa biaya total yang dikeluarkan untuk setiap hektar usahatani tersebut diatas berbeda antara satu dengan lainnya. Biaya total terbesar di-

Tabel 22. Tambahhan Biaya Yang Dikeluarkan Pada Usahatani TRIS dan TRIT per Hektar Di Wilayah KUD Raga Separih, MT 1982/1983.

Sistem Usahatani	Garap/ Pemeli- haraan tanaman	Sarana Produksi Bibit	Pupuk	Tebang/Angkut	Bunga Kredit	Total
	----- (Rupiah) -----					
TRIS I	86.000	-	28.500	125.000	75.811,25	315.311,25
TRIS II	97.500	-	39.000	76.500	47.540,00	260.540,00
TRIT I	5.000	-	47.500	119.900	56.182,00	228.582,00
TRIT II	4.000	-	61.000	127.600	36.809,00	228.809,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

88
Tabel 23. Biaya Total Yang Dikeluarkan Pada Usaha tani TRIS dan TRIT per Hektar Di Wilayah KUD Raga Separih, MT 1982/1983.

Sistem Usahatani	Biaya Menurut Paket Kredit	Tambahan Biaya	Total Biaya
	----- (Rupiah) -----		
TRIS I	1.066.500	315.311,25	1.381.811,25
TRIS II	750.500	260.540,00	996.040,00
TRIT I	763.000	228.582,00	991.582,00
TRIT II	556.500	228.809,00	785.309,00

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

keluarkan oleh usahatani TRIS I yaitu sebesar Rp. 1.381.811,25 kemudian berturut-turut usahatani TRIS II sebesar Rp. 996.040, TRIT I sebesar Rp. 991.582 dan yang paling kecil usahatani TRIT II sebesar Rp. 785.309,-.

Dari segi biaya total yang dikeluarkan, terlihat bahwa jenis usahatani tebu tanaman pertama di lahan sawah (TRIS I) maupun di lahan tegalan (TRIT I) diperlukan biaya yang lebih besar dari pada usahatani tebu keprasan atau tanaman kedua di lahan sawah (TRIS II) dan di lahan tegalan (TRIT II). Perbedaan besarnya total biaya tersebut antara lain disebabkan oleh adanya perbedaan bibit yang dipakai, biaya garap dan pemeliharaan tanaman, tambahan biaya yang dikeluarkan, bunga kredit dan biaya lain seperti biaya untuk dana KUD, dana desa dan dana kelompok.

Disamping terdapat perbedaan dalam biaya yang dikeluarkan, terdapat pula perbedaan dalam penerimaan yang kemudian berakibat kepada perbedaan pendapatan antara usahatani tebu satu dengan lainnya.

Pada tabel 24, terlihat bahwa penerimaan usahatani per hektar pada musim tanam 1982/1983 tertinggi dicapai oleh usahatani TRIS I, yaitu sebesar Rp. 2.475.967,39 dan kemudian berturut-turut usahatani TRIS II sebesar Rp. 2.429.812,56 TRIT I sebesar Rp. 1.897.404,67 dan terkecil pada penerimaan usahatani TRIT II yaitu sebesar Rp. 1.849.378,17. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan produksi dan rendemen yang diperoleh masing-masing usahatani tebu tersebut.

Tabel 24 . Penerimaan Total Yang Diterima oleh Petani Pada Usahatani TRIS dan TRIT Per Hektar, Di Wilayah KUD Raga Separih MT 1982/1983.

Sistem Usahatani	Nilai Gula Bagian Petani	Tetes	BBH	TPPT	Penerimaan Lain	Total
TRIS I	1.892.327,11	116.016,92	300.000	112.411,27	55.000	2.475.967,39
TRIS II	1.956.427,37	119.946,85	220.000	116.219,06	17.000	2.429.812,56
TRIT I	1.501.041,45	92.027,54	160.000	89.167,45	55.000	1.897.404,67
TRIT II	1.492.095,80	91.479,09	160.000	88.636,04	17.000	1.849.378,17

Keterangan : 1) Penerimaan dari sisa paket kredit dan biaya bibit yang tidak digunakan

Sumber : Hasil pengolahan data primer

tanaman tebu pertama akan lebih besar dari pada tanaman tebu kedua. Disamping itu, karena adanya perbedaan biaya pemakaian bibit. Untuk tanaman tebu kedua bibit adalah hasil keprasan tanaman pertama, jadi tidak ada biaya tambahan untuk bibit dibandingkan tanaman tebu pertama.

Sedangkan jika dibandingkan pendapatan antara usahatani TRIS dan TRIT, maka usahatani TRIS mempunyai rata-rata pendapatan lebih tinggi dari pada usahatani TRIT. Hal ini disebabkan karena tingkat kesuburan lahan sawah relatif lebih tinggi dari pada lahan tegalan, sehingga akan mempengaruhi tingkat produktifitas dan nilai rendemen tebu.

Selanjutnya pendapatan selain diukur dengan nilai mutlak juga dapat dianalisa tentang efisiensinya. Salah satu ukuran efisiensi dalam telaahan ini menggunakan "Revenue Cost Ratio atau R/C ratio", yaitu untuk melihat besarnya penerimaan setiap rupiah modal yang digunakan.

Pada tabel 25, terlihat bahwa nilai R/C ratio tertinggi pada usahatani TRIS II yaitu sebesar 2,44 yang artinya untuk setiap rupiah modal yang digunakan untuk usahatani TRIS II menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 2,44. Kemudian berturut-turut pada usahatani TRIT II yaitu sebesar 2,35, usahatani TRIT I sebesar 1,91 dan yang paling kecil nilai R/C ratio pada usahatani TRIS I yaitu sebesar 1,79. Sehingga berdasarkan keterangan diatas, maka usahatani TRIS II adalah yang paling efisien dalam pemakaian modal jika dibandingkan dengan usahatani TRIT II, TRIT I dan TRIS I.

Tabel 25 . Biaya Total, Penerimaan Total, Pendapatan dan R/C ratio pada Usahatani TRIS dan TRIT per Hektar Di Wilayah KUD Raga Separih MP 1982/1983.

Stsistem Usahatani	Biaya Total (Rp)	Penerimaan Total (Rp)	Pendapatan (Rp)	R/C Rattio
TRIS I	1.381.811,25	2.475.967,39	1.094.156,14	1,79
TRIS II	996.040,00	2.429.812,56	1.438.230,56	2,44
TRIT I	991.582,00	1.897.404,67	905.822,67	1,91
TRIT II	785.309,00	1.849.378,17	1.064.069,17	2,35

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



IV. 2. Analisa Pendapatan Usahatani Non Tebu

Selain dapat ditanami tebu, tanah sawah maupun tanah tegalan juga dapat ditanamai dengan tanaman lainnya. Petani sebagai salah satu pengambil keputusan dalam proses produksi menghadapi berbagai macam pilihan dalam mengalokasikan sumberdaya untuk kegiatannya.

Walaupun dibatasi dengan kemampuan pengetahuan dan luas tanah milik, petani dapat bebas memilih pilihan untuk menentukan berbagai macam tanaman dan sumberdaya tenaga untuk berbagai macam usaha. Tentunya petani akan memilih usaha yang paling menguntungkan atau yang paling tinggi dalam memperoleh pendapatan.

Pada tabel 26, terlihat perbedaan pendapatan antara usahatani tebu yaitu, TRIS I, TRIS II, TRIT I dan TRIT II dengan usahatani non tebu yaitu, padi-padi-padi dan padi-padi-jagung serta pendapatan dari sewa tanah. Ternyata pendapatan tertinggi dari usahatani tersebut adalah pendapatan usahatani TRIS II yaitu sebesar Rp. 1.438.230,56. Kemudian berturut-turut pendapatan usahatani padi-padi-padi yaitu sebesar Rp. 1.255.268,14, usahatani padi-padi-jagung sebesar Rp. 1.127.152, usahatani TRIS I sebesar Rp. 1.094.156,14 usahatani TRIT II sebesar Rp. 1.064.069,17 dan pendapatan dari usahatani TRIT I yaitu sebesar Rp. 905.822,67 serta yang paling kecil adalah pendapatan dari sewa tanah yaitu sebesar Rp. 975.000,-.

Tabel 26 . Biaya Total, Penerimaan Total, Pendapatan dan R/C Ratio pada berbagai Sistem Usahatani Yang Diusahakan di Wilayah KUD Raga Separih, MT 1982/1983

Sistem Usahatani	Biaya Total (Rp)	Penerimaan Total (Rp)	Pendapatan (Rp)	R/C Ratio
TRIS I	1.381.811,25	2.475.967,39	1.094.156,14	1,79
TRIS II	996.040,00	2.429.812,56	1.438.230,56	2,44
TRIT I	991.582,00	1.897.404,67	905.822,67	1,91
TRIT II	785.309,00	1.849.378,17	1.064.069,17	2,35
Padi-padi-padi	814.490,00	2.081.758,14	1.255.268,14	2,56
Padi-padi-jagung	743.396,00	1.860.548,00	1.127.152,00	2,50
Sewa	-	-	975.000,00	-

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

@Hak cipta milik IPB University

IPB University



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber ;

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Pada tabel 26, juga terlihat nilai hasil guna modal yang ditunjukkan dengan nilai R/C ratio. Jika diperhatikan ternyata nilai R/C ratio tertinggi didapatkan oleh usahatani padi-padi-padi yaitu sebesar 2,56, artinya untuk satu rupiah modal menghasilkan penerimaan sebesar Rp. 2,56. Kemudian berturut-turut pada usahatani padi-padi-jagung yaitu sebesar 2,50, usahatani TRIS II sebesar 2,44, usahatani TRIT II sebesar 2,35, dan usahatani TRIT I sebesar 1,91 serta nilai R/C ratio yang terkecil adalah pada usahatani TRIS I yaitu sebesar 1,79.

Berdasarkan keterangan diatas maka usahatani padi-padi-padi mempunyai tingkat hasil guna yang paling tinggi terhadap pemakaian modal, dibandingkan dengan usahatani lainnya. Sedangkan usahatani tebu secara rata-rata tingkat hasil guna pemakaian modal lebih kecil dari pada usahatani padi-padi-padi dan padi-padi-jagung. Hal ini dimungkinkan karena adanya perbedaan pola pemakaian biaya untuk masing-masing usahatani.

Hasil nilai pendapatan dan R/C ratio diatas ternyata tidak mempengaruhi keikutsertaan petani dalam program TRI. Kenyataan ini disebabkan karena di wilayah KUD Raga Separéh petani sudah lama menanam tebu dan tebu dianggap yang paling menguntungkan, karena pengelolaan tanaman tebu relatif lebih mudah, lagi pula adanya serangan hama dan penyakit relatif lebih kecil. Disamping itu dengan menanam tebu merupakan tabungan, dimana pada suatu saat petani akan menerima uang sekaligus dalam jumlah besar.

V. TELAAHAN TINGKAT KOMERSIALISASI PETANI DALAM USAHATANI TEBU RAKYAT

Untuk mengetahui taraf kemajuan pengelolaan usahatani tebu rakyat, salah satunya adalah dengan menelaah tingkat komersialisasi petani.

Tingkat komersialisasi petani secara kuantitatif dapat ditelaah dengan melihat keterlibatan petani dengan luar lingkungan keluarganya. Yaitu dengan menelaah besarnya persentase sumbangan input dari luar keluarga dan besarnya output yang disumbangkan keluar keluarga.

Analisa secara kuantitatif tersebut di atas ternyata tidak dapat digunakan secara mutlak pada tanaman tebu dalam sistem TRI. Karena besarnya persentase output yang disumbangkan keluar keluarga sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu sebesar 99 persen.

Berdasarkan keterangan di atas, maka tingkat komersialisasi petani tebu dalam sistem TRI ditelaah dengan melihat besarnya persentase sumbangan input dari luar keluarga. Dengan menggunakan analisa (1) Ratio tenaga kerja; dalam analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya persentase tenaga kerja dari luar keluarga yang digunakan dalam proses usahatani, dan (2) Ratio sarana produksi; dalam analisa ini dimaksudkan untuk mengetahui besarnya persentase sarana produksi dari luar keluarga yang digunakan dalam proses usahatani.

V. 1. Ratio Tenaga Kerja

Penggunaan tenaga kerja pada proses usahatani tebu rakyat dibedakan atas tenaga kerja dari dalam keluarga dan

tenaga kerja dari luar keluarga. Sedangkan tenaga kerja yang tersedia terdiri dari, tenaga kerja pria, wanita dan tenaga kerja ternak.

Dari hasil wawancara dan pengamatan di lapang maka kebutuhan tenaga kerja per hektar untuk usahatani tebu rakyat intensifikasi di lahan sawah untuk tanaman pertama (TRIS I), seperti terlihat pada tabel 27.

Pada tabel 27, terlihat bahwa kebutuhan tenaga kerja per hektar pada usahatani TRIS I adalah sebesar 553,21 HKP, yang terdiri dari tenaga kerja dari dalam keluarga sebesar 103,46 HKP atau 18,70 persen, dan tenaga kerja dari luar keluarga sebesar 449,75 HKP atau 81,30 persen.

Penggunaan tenaga kerja dari dalam keluarga sebesar 103,46 HKP terdiri dari tenaga kerja pria sebesar 99,64 HKP atau 96,31 persen, dan tenaga kerja wanita sebesar 3,82 HKP atau 3,69 persen. Sedangkan untuk tenaga kerja dari ternak adalah sebesar 0 HKP, hal ini disebabkan dalam proses pengolahan tanah petani sebagian besar menyewa ternak.

Penggunaan tenaga kerja dari dalam keluarga yang paling besar adalah untuk mengerjakan kletekan yaitu sebesar 23,20 HKP atau 22,42 persen, yang sebagian besar adalah tenaga kerja pria yaitu sebesar 20,88 HKP atau 20,18 persen dan tenaga kerja wanita sebesar 2,32 HKP atau 2,24 persen. Hal ini dimung kinkan.. karena tenaga kerja pria untuk mengerjakan di sawah lebih banyak dari pada tenaga kerja wanita. Sedangkan je- nis pekerjaan pengairan dan tebangan tidak menggunakan tena ga kerja dari dalam keluarga, sebab pekerjaan ini biasanya diborongkan atau diupahkan secara keseluruhan.

bel 27. Penggunaan tenaga kerja manusia dan ternak dalam dan luar keluarga per hektar dalam TRIS I, di wilayah KUD Raga Separéh MT 1982/1983.

jenis pekerjaan	Tenaga kerja Dalam keluarga(HKP)				Tenaga kerja Luar keluarga(HKP)				Total (HKP)
	P	W	T	Jmlh	P	W	T	Jmlh	
rsiapan	9,95	-	-	9,95	0,66	-	-	0,66	10,61
mbuatan got	16,94	-	-	16,94	76,23	-	-	76,23	93,17
mbuatan ring	8,77	-	-	8,77	48,03	-	-	48,03	56,80
nggarpu	6,15	-	-	6,15	31,22	-	-	31,22	37,37
aci	3,46	-	-	3,46	22,30	-	-	22,30	25,76
but	13,77	0,78	-	14,55	14,58	36,60	-	51,18	65,73
nam	1,34	0,24	-	1,58	5,66	8,94	-	14,60	16,18
ngairan	-	-	-	-	3,45	-	-	3,45	3,45
emupuk	4,64	0,48	-	5,12	6,16	3,34	-	9,50	14,62
etekan	20,88	2,32	-	23,20	31,40	20,08	-	51,48	74,68
nyemprotan	3,12	-	-	3,12	0,48	-	-	0,48	3,60
lut	7,76	-	-	7,76	52,15	7,64	-	59,79	67,55
meliharaan t	2,86	-	-	2,86	8,25	-	-	8,25	11,11
bang	-	-	-	-	72,58	-	-	72,58	72,58
mlah (HKP)	99,64	3,82	-	103,46	373,15	76,60	-	449,75	553,21

terangan: P= Pria T = Ternak
W= Wanita Jmlh= Jumlah

umber : Hasil pengolahan data primer

Penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga sebesar 449,75 HKP, terdiri dari tenaga kerja pria sebesar 373,15 HKP atau 82,97 persen, dan tenaga kerja wanita sebesar 76,6 HKP atau sebesar 17,03 persen, sedangkan untuk tenaga kerja dari ternak adalah 0 HKP sebab dalam usahatani TRIS I tidak menggunakan tenaga kerja ternak dalam pengelolaan tanahnya.

Penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga yang paling besar adalah untuk pembuatan got, yaitu sebesar 76,23 HKP atau sebesar 16,95 persen yang kesemuanya dikerjakan oleh tenaga kerja pria sebab jenis pekerjaan ini cukup berat.

Pada tabel 28, terlihat bahwa besarnya ratio antara penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga dengan total penggunaan tenaga kerja adalah sebesar 0,813, lebih besar jika dibandingkan dengan ratio antara penggunaan tenaga kerja dari dalam keluarga dengan total penggunaan tenaga kerja yaitu sebesar 0,187. Sehingga berdasarkan telaahan ratio tenaga kerja maka usahatani TRIS I sudah menuju pada tingkat yang komersialisasi, sebab sudah 81,30 persen menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.

Tabel 28 . Ratio Penggunaan Tenaga Kerja Dalam dan Luar Keluarga dengan Total Penggunaan Tenaga Kerja per Hektar Dalam Usahatani TRIS I, di Wilayah KUD Raga Separéh, MT 1982/1983.

Sumber Tenaga Kerja	Jumlah HKP	Ratio
Dalam Keluarga	103,46	0,187
Luar Keluarga	449,75	0,813
Jumlah	553,21	1,000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Sedangkan pada tabel-29 memperlihatkan besarnya ratio untuk masing-masing jenis kegiatan, ternyata nilai ratio semuanya menunjukkan lebih besar pada ratio antara penggunaan tenaga kerja luar keluarga dengan total penggunaan tenaga kerja, kecuali pada jenis kegiatan persiapan lahan dan penyemprotan hama penyakit. Hal ini disebabkan karena jenis pekerjaan ini biasanya langsung ditangani oleh petani sendiri.

Pada jenis kegiatan pengairan dan tebang nilai ratio antara penggunaan tenaga kerja luar keluarga dengan total penggunaan tenaga kerja sebesar 1, hal ini menunjukkan bahwa jenis pekerjaan pengairan dan tebang oleh petani semuanya sudah diborongkan.

Didalam usahatani tebu rakyat di wilayah KUD Raga Separih sistem upah tenaga kerja yang digunakan ada dua yaitu, pertama sistem upah secara borongan dan kedua, sistem upah secara harian.

Sistem upah borongan yaitu, jika sistem upah yang didasarkan pada jenis pekerjaan dan dibayar hingga pekerjaan tersebut selesai. Sedangkan sistem upah harian jika sistem upah yang didasarkan pada jenis pekerjaan dan dibayar setiap hari kerja.

Didalam telaahan ini upah tenaga kerja dikonversikan dalam sistem upah borongan, yaitu upah tenaga kerja dalam menyelesaikan 1 hektar proses produksi usahatani TRIS I, seperti terlihat pada tabel 30 .

Tabel 29. Ratio masing-masing jenis pekerjaan antara tenaga kerja dalam keluarga dan tenaga kerja luar keluarga dengan total penggunaan tenaga kerja per hektar pada TRIS I, di Wilayah KUD Raga Separéh, MT 1982/1983.

Jenis pekerjaan	Jmlh TK(HKP) dlm keluarga	Jmlh TK(HKP) luar keluarga	Total (HKP)	Nilai Ratio	
	(a)	(b)	(c)	a/c	b/c
Persiapan	9,95	0,66	10,61	0,94	0,06
Pembuatan got	16,94	76,23	93,17	0,18	0,82
Pembuatan juring	8,77	48,03	56,80	0,15	0,85
Menggarpu	6,15	31,22	37,37	0,16	0,84
Klaci	3,46	22,30	25,76	0,13	0,87
Bubut	14,55	51,18	65,73	0,22	0,78
Tanam	1,58	14,60	16,18	0,10	0,90
Pengairan	-	3,45	3,45	-	1,00
Memupuk	5,12	9,50	14,62	0,35	0,65
Kletekan	23,20	51,48	74,68	0,31	0,69
Penyemprotan HPT	3,12	0,48	3,60	0,87	0,13
Gulut	7,76	59,79	67,55	0,11	0,89
Pemeliharaan got	2,86	8,25	11,11	0,26	0,74
Tebang	-	72,58	72,58	-	1,00

Sumber : Hasil pengolahan data primer.

Tabel 30. Upah tenaga kerja dalam menyelesaikan 1 hektar proses produksi TRIS I, di Wilayah KUD Raga - Separih MT 1982/1983.

Jenis pekerjaan	Upah tenaga kerja(dalam rupiah)
Persiapan	3.000
Pembuatan got	19.000
Pembuatan juringan	90.000
Menggarpu	32.000
Klaci	40.000
Bubut	48.000
Tanam	12.000
Pengairan	5.000
Memupuk	16.000
Kletekan	43.200
Penyemprotan HPT	3.000
Gulut	56.800
Pemeliharaan got	8.000
Tebang	127.500
Jumlah	503.500

Sumber : Hasil pengolahan data primer.

Jika upah tenaga kerja tersebut diatas dihitung berdasarkan upah harian, maka rata-rata upah satu hari kerja pria adalah sebesar Rp. 919,54.

Pada tabel 31, terlihat bahwa kebutuhan tenaga kerja per hektar pada proses produksi usahatani tebu rakyat intensifikasi pada tanah tegalan untuk tanaman pertama (TRIT I) adalah sebesar 369,01 HKP, yang terdiri dari tenaga kerja dari dalam keluarga sebesar 67,95 HKP atau 18,41 persen dan tenaga kerja dari luar keluarga sebesar 301,06 HKP atau sebesar 81,59 persen.

Penggunaan tenaga kerja dari dalam keluarga sebesar 67,95 HKP terdiri dari tenaga kerja pria sebesar 57,71 HKP atau 84,93 persen, dan tenaga kerja wanita sebesar 10,24 HKP atau 15,07 persen. Sedangkan untuk tenaga kerja dari ternak adalah sebesar 0 HKP, hal ini disebabkan karena dalam proses pengolahan tanah, menyewa ternak dari luar keluarga.

Penggunaan tenaga kerja dari dalam keluarga yang paling besar adalah untuk mengerjakan bubut atau penyiangan, yaitu sebesar 31,06 HKP atau 45,71 persen, yang sebagian besar adalah tenaga kerja pria yaitu sebesar 25,26 HKP atau 37,17 persen, sedangkan tenaga kerja wanita sebesar 5,8 HKP atau sebesar 8,54 persen. Hal ini dimungkinkan karena tenaga kerja pria banyak untuk mengerjakan keperluan disawah dibandingkan dengan tenaga kerja wanitanya.

Sedangkan jenis pekerjaan pengolahan tanah, larikan, kletekan dan pengairan tidak menggunakan tenaga kerja dari

Tabel 31 . Penggunaan Tenaga Kerja Manusia dan Ternak dari Dalam dan Luar Keluarga per hektar pada TRIT I, di Wilayah KUD Raga Separih MT 1982/1983.

Jenis Pekerjaan	Tenaga Kerja Dalam Keluarga			Tenaga Kerja Luar Keluarga			Total
	P.	W	T	P	W	T	
	-----			-----			
				(HKP)			
Pengolahan tanah	-	-	-	8,58	-	84,99	93,57
Larikan	-	-	-	1,43	-	17,00	18,43
Tanam	9,33	2,66	-	2,67	-	-	2,67
Memupuk	11,10	1,78	-	-	-	-	-
Kl etekan	-	-	-	24,48	-	-	24,48
Bubut	25,26	5,80	-	27,60	32,72	-	60,32
Penyemprotan HP	4,22	-	-	-	-	-	-
Pengairan	-	-	-	3,45	-	-	3,45
Gulut	7,80	-	-	48,43	5,31	-	53,74
Tebang	-	-	-	44,40	-	-	44,40
Jumlah	57,71	10,24	-	161,04	38,03	101,99	301,06
							369,01

Keterangan :

@Hak cipta milik IPB Un

P = Pria
W = Wanita
T = Ternak
Jmlh = Jumlah

Sumber : Pengolahan data primer

1. Diambil dari data yang telah diproses dan dicatat oleh peneliti.
2. Diambil dari data yang telah diproses dan dicatat oleh peneliti.

dalam keluarga, sebab jenis pekerjaan ini biasanya diborongkan atau diupahkan secara keseluruhan.

Penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga sebesar 301,06 HKP, terdiri dari tenaga kerja pria sebesar 161,04 HKP atau 53,49 persen, tenaga kerja wanita sebesar 38,03 HKP atau 12,63 persen dan tenaga kerja ternak sebesar 101,99 HKP atau 33,88 persen.

Penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga yang paling besar adalah untuk mengolah tanah, yaitu sebesar 93,57 HKP atau sebesar 31,08 persen, dimana 84,99 HKP atau 28,23 persen berasal dari tenaga kerja ternak dan 8,58 HKP atau 2,85 persen berasal dari tenaga kerja pria. Penggunaan tenaga kerja ternak yang lebih besar ini disebabkan karena untuk mengolah tanah tegalan diperlukan ternak sebab tanah tegalan relatif lebih sulit diolah jika dibandingkan dengan tanah sawah.

Sedangkan untuk jenis pekerjaan pemupukan dan penyemprotan HPT tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga, karena jenis pekerjaan ini dianggap oleh petani sudah cukup jika dikerjakan sendiri dengan keluarganya.

Pada tabel 32, terlihat bahwa besarnya ratio antara penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga dengan total penggunaan tenaga kerja adalah sebesar 0,8156 lebih besar jika dibandingkan dengan ratio antara penggunaan tenaga kerja dari dalam keluarga dengan penggunaan tenaga kerja total, yaitu sebesar 0,1844. Sehingga jika berdasarkan telaahan

ratio tenaga kerja maka usahatani TRIT I sudah menuju pada tingkat yang komersialisasi, sebab sudah 81,56 persen menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.

Tabel 32. Ratio Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Keluarga, dan Luar Keluarga dengan Total Penggunaan Tenaga Kerja per Hektar Dalam Usahatani TRIT I di Wilayah KUD Raga Separih MT 1982/1983.

Sumber Tenaga Kerja	Jumlah HKP	Ratio
Dalam Keluarga	67,95	0,1844
Luar Keluarga	301,06	0,8156
Jumlah	369,01	1,0000

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Pada tabel 33, terlihat besarnya ratio untuk masing-masing jenis pekerjaan, ternyata nilai ratio untuk jenis pekerjaan pengolahan tanah, larikan, kletekan, pengairan serta tebang menunjukkan nilai ratio antara penggunaan tenaga kerja luar keluarga dengan total penggunaan tenaga kerja adalah sebesar 1, artinya jenis pekerjaan tersebut di atas hanya menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga.

Sedangkan pada jenis pekerjaan memupuk dan penyemprotan hama penyakit menunjukkan nilai ratio antara penggunaan tenaga kerja dari dalam keluarga dengan total penggunaan tenaga kerja adalah sebesar 1, artinya jenis pekerjaan tersebut hanya dikerjakan oleh keluarga petani sendiri. Tetapi secara

rata-rata nilai ratio, menunjukkan bahwa penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga lebih besar dari pada dari dalam keluarga seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Tabel 33. Ratio Masing-masing Jenis Pekerjaan Antara Tenaga kerja dalam dan luar keluarga dengan Total Penggunaan Tenaga Kerja Per Hektar pada TRIT I, Di Wilayah KUD Raga Separéh, MT 1982/1983.

Jenis Pekerjaan	Jmlh TK(HKP) Dlm Keluarga	Jmlh TK(HKP) Luar Keluarga	Total (HKP)	Nilai Ratio	
	(a)	(b)	(c)	a/c	b/c
Pengolahan	-	93,57	93,57	-	1,00
Larikan	-	18,43	18,43	-	1,00
Tanam	11,99	2,67	14,66	0,82	0,18
Memupuk	12,88	-	12,88	1,00	-
Kletekan	-	24,48	24,48	-	1,00
Bubut	31,06	60,32	91,38	0,34	0,66
Penyemprotan HPT	4,22	-	4,22	1,00	-
Pengairan	-	3,45	3,45	-	1,00
Gulut	7,80	53,74	61,54	0,13	0,87
Tebang	-	44,40	44,40	-	1,00

Sumber : Pengolahan Data Primer

Pada tabel 34, terlihat bahwa upah tenaga kerja total untuk proses usahatani TRIT I adalah sebesar Rp. 347.500,- sehingga upah rata-rata harian tenaga kerja pria adalah sebesar Rp. 941,71.

Dari tabel 27 dan tabel 31 dapat dibandingkan bahwa kebutuhan tenaga kerja total antara usahatani TRIS I dan TRIT I ternyata lebih besar pada usahatani TRIS I, yaitu untuk TRIS I sebesar 553,21 HKP dan TRIT I adalah sebesar 369,01 HKP. Tetapi jika dilihat pada rata-rata upah satu hari kerja pria maka usahatani TRIT I lebih besar jika dibandingkan dengan usahatani TRIS I. Yaitu untuk usahatani TRIT I sebesar Rp. 941,71 dan untuk usahatani TRIS I sebesar Rp. 919,54. Hal ini disebabkan karena tanah tegalan relatif lebih sulit pengolahannya dari pada tanah sawah.

Tabel 34. Upah Tenaga Kerja Dalam Menyelesaikan 1 hektar proses produksi Usahatani TRIT I, di Wilayah KUD Raga Separéh MT 1982/1983.

Jenis Pekerjaan	Upah Tenaga Kerja (Rp)
Pengolahan Tanah	30.000
Larikan	6.000
Tanam	12.000
Memupuk	16.000
Kletekan	43.000
Bubut	48.000
Penyemprotan HPT	3.000
Pengairan	5.000
Gulut	56.000
Tebang	127.500
J u m l a h	347.500

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Jika dibandingkan antara tabel 28 dan 32, menunjukkan bahwa berdasarkan telaahan ratio tenaga kerja ternyata di wilayah KUD Raga Separéh usahatani TRIS I dan TRIT I menunjukkan tingkat komersialisasi yang relatif tidak jauh berbeda. Yaitu untuk usahatani TRIS I sebesar 0,8130 dan untuk usahatani TRIT I sebesar 0,8156, sehingga dengan nilai ratio tersebut menunjukkan bahwa usahatani TRIS I dan TRIT I masing-masing sudah cenderung menuju pada tingkat komersialisasi.

V. 2. Ratio Sarana Produksi

Dalam telaahan ini melihat ratio antara sarana produksi yang dibeli dengan jumlah seluruh sarana produksi yang dipakai dalam proses produksi. Sehingga diketahui besarnya persentase sarana produksi sumbangan dari luar keluarga dan besarnya persentase sumbangan sarana produksi dari dalam keluarga.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa kebutuhan sarana produksi yang sangat penting untuk usahatani tebu rakyat di wilayah KUD Raga Separéh adalah bibit, pupuk dan obat-obatan. Oleh sebab itu telaahan ratio sarana produksi disini hanya melihat sarana produksi bibit, pupuk dan obat-obatan.

Hasil wawancara dan pengamatan di lapangan ditunjukkan oleh tabel 35. Pada tabel 35, terlihat bahwa kebutuhan sarana produksi pada usahatani TRI (TRIS I dan TRIT I) ternyata 100 persen dipenuhi dari luar keluarga, artinya usaha petani

untuk mendapatkan sarana produksi bibit, pupuk dan obat-obatan dengan cara membeli, baik melalui KUD, kios/toko swasta maupun dari melalui petani lain.

Tabel 35. Sumber Sarana Produksi Petani, dan Ratio Sarana Produksi Yang Digunakan Dari Dalam dan Luar Keluarga dengan Total Penggunaan Sarana Produksi pada Usahatani TRI per Hektar, di Wilayah KUD Raga Separéh MT 1982/1983.

Jenis Sarana Produksi	Sumber Sarana Produksi(%)		Total (%)	Ratio	
	Dalam Keluarga (a)	Luar Keluarga (b)		a/c	b/c
Bibit	0	100	100	0	1
Pupuk	0	100	100	0	1
Obat-obatan	0	100	100	0	1

Sumber : Hasil Pengolahan Data Primer

Berdasarkan telaahan ratio sarana produksi menunjukkan bahwa nilai ratio antara ; bibit, pupuk dan obat-obatan yang berasal dari luar keluarga dengan total penggunaan sarana produksi bibit, pupuk dan obat-obatan dalam usahatani TRI menunjukkan nilai sebesar 1, seperti terlihat pada tabel 35. Nilai ratio sarana produksi sebesar 1 tersebut diatas berarti bahwa semua kebutuhan sarana produksi bibit, pupuk dan obat-obatan berasal dari luar keluarga atau membeli.

Sehingga berdasarkan telaahan ratio sarana produksi maka usahatani TRI di wilayah KUD Raga Separéh sudah mutlak 100 persen mencapai tingkat komersialisasi.



VI. PEMBAHASAN

1. Konsep Komersialisasi Dalam Sistem TRI

Tingkat komersialisasi petani tebu dalam sistem tebu rakyat intensifikasi (TRI) sebagai salah satu ukuran kemajuan pengelolaan usahatani, dipengaruhi oleh lembaga-lembaga yang terlibat dalam sistem TRI, yaitu pabrik gula (PG), Koperasi Unit Desa (KUD) serta kelompok tani tebu.

Pengukuran tingkat komersialisasi usahatani tebu dapat dibedakan dengan usahatani tanaman bahan pangan pokok. Hal ini karena tanaman tebu merupakan tanaman perdagangan ("Cash Crop"), sehingga sebagian besar atau hampir seluruhnya dijual.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, maka konsep pengukuran tingkat komersialisasi menurut Wharton tidak dapat secara keseluruhan dipakai dalam analisa usahatani tanaman tebu. Dalam sistem TRI petani diharuskan menjual 99 persen hasil produksinya untuk memenuhi kebutuhan pasar, melalui pabrik gula.

Dengan demikian dalam analisa tingkat komersialisasi petani tebu dipakai kriteria, besarnya persentase sumbangan input sarana produksi dan penggunaan tenaga kerja dari luar keluarga dalam pengelolaan usahatani.

Usaha untuk memenuhi kebutuhan input sarana produksi dan tenaga kerja dalam sistem TRI tidak terlepas dari peran pabrik gula (PG), Koperasi Unit Desa (KUD), serta kelompok tani tebu yang mempunyai hubungan saling terkait dan menunjang satu dan lainnya.

Hak Cipta dilindungi undang-undang.
1. Dilarang menyalin, menduplikasi, atau menyebarkan secara elektronik atau mekanis, termasuk dengan menggunakan perangkat lunak, tanpa izin dari IPB University.
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya, atau membuat karya turunan atau menyunting, tanpa izin dari IPB University.
3. Penggunaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah, tanpa izin dari IPB University.
4. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.

Pabrik gula sebagai penggiling serta pengolah tebu menghendaki terjaminnya persediaan bahan baku tebu baik secara kuantitas maupun kualitasnya, akan berusaha memberikan pembinaan pada petani tebu dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas serta rendemen tebu. Dalam hal ini peranan pabrik gula adalah dengan memberikan penyuluhan kultur teknis serta menyediakan bibit unggul.

Koperasi Unit Desa (KUD) sebagai wadah perekonomian pedesaan yang melayani kebutuhan petani, menghendaki adanya peranserta secara aktif dari para anggotanya. Dengan demikian peranan KUD dalam menyediakan kebutuhan sarana produksi petani berupa pupuk, obat-obatan dan kredit dapat dimanfaatkan oleh petani tebu.

Sedangkan peranan kelompok tani tebu dalam mengkoordinasi kebutuhan sarana produksi dan tenaga kerja adalah cukup besar, baik pada saat penanaman, pemeliharaan maupun pada saat penebangan dan pengangkutan tebu.

Berdasarkan penelaahan peranan pabrik gula (PG), Koperasi Unit Desa (KUD), dan kelompok tani tebu dalam sistem TRI, ternyata peranan tersebut sangat mendorong petani tebu menuju sistem usaha yang komersial.

2. Pendekatan Kelompok Dalam Sistem TRI

Dalam sistem TRI penyelenggaraan usahatani tebu rakyat ditingkat petani diorganisasikan dalam bentuk kelompok tani tebu, yang bertujuan untuk mempermudah pembinaan dan penyaluran input sarana produksi dari KUD dan PG kepada petani.

Dalam sistem TRI ada tiga bentuk kelompok, yaitu kelompok kolektif, kelompok koordinatif dan kelompok kooperatif. Adapun ciri-ciri yang membedakan ke tiga bentuk kelompok tersebut pada dasarnya terletak pada keterlibatan petani anggota dan pengurus kelompok dalam pengelolaan usahatani. Pada kelompok kolektif, para petani anggota kelompok menyerahkan seluruh pengelolaan dan tanggungjawab tanaman tebunya kepada pengurus kelompok. Kelompok koordinatif, pengelolaan usahatani dilakukan oleh petani anggota kelompok sendiri sedangkan pengurus kelompok hanya bertindak sebagai koordinator dalam pembinaan anggota dan penghubung dengan pihak luar. Sedangkan pada kelompok kooperatif, pengelolaan usahatani dilakukan oleh petani anggota kelompok sendiri, dan pengurus kelompok hanya mengelola kegiatan tertentu yang bertujuan untuk efisiensi, misalnya dalam mengkoordinasi kebutuhan sarana produksi pupuk, bibit, kredit serta tenaga kerja untuk penebangan dan pengangkutan.

Berdasarkan keterangan di atas, jika ditelaah tingkat dinamika kelompok berdasarkan struktur kelompok sebagai pengorganisasian atau pengaturan kelompok, maka kelompok tani tebu dalam sistem TRI sudah menuju pada tingkat yang cukup baik, artinya sudah terdapat pembagian tugas dan wewenang dalam pengurus.

Tingkat dinamika kelompok kolektif berdasarkan unsur otoritas dan wewenang, yaitu hak anggota dalam pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah dan membuat rencana bersama, relatif masih rendah dibandingkan dengan kelompok-

koordinatif dan kelompok kooperatif. Hal ini karena pada bentuk kelompok kolektif hanya pengurus yang mempunyai hak dalam pengelolaan usahatani, sedangkan pada bentuk kelompok koordinatif dan kelompok kooperatif semua anggota kelompok mempunyai hak dalam pengelolaan usahatani.

Sedangkan tingkat dinamika kelompok berdasarkan peran-serta anggota dan pengurus kelompok dalam pengelolaan usaha tani tebu, maka bentuk kelompok kooperatif mempunyai tingkat yang paling tinggi, kemudian berturut-turut bentuk kelompok koordinatif dan paling rendah terdapat pada bentuk kelompok kolektif.

Sesuai dengan telaahan di atas, maka tingkat dinamika kelompok tani tebu dalam sistem TRI berdasarkan unsur struktur kelompok, otoritas dan wewenang serta peranserta anggota dan pengurus kelompok dalam pengelolaan usahatani tebu, bentuk kelompok kooperatif mempunyai tingkat dinamika kelompok paling tinggi dan kemudian berturut-turut bentuk kelompok koordinatif serta paling rendah pada bentuk kelompok kolektif.

Dengan demikian berdasarkan tingkatan dinamika kelompok di atas, maka pendekatan kelompok dalam sistem TRI hendaknya diarahkan pada bentuk kelompok kooperatif.



VII. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelaahan dan analisa masalah fungsi dan peranan KUD dalam pengembangan usahatani tebu rakyat yaang telah diuraikan di depan maka dapat disimpulkan, bahwa :

- (a) Dengan adanya perubahan sistem, dari sistem sewa menjadi sistem TRI, ternyata hal ini tidak banyak membawa perubahan pada hubungan antara PG. Kreet Baru sebagai penggiling dan pengolah bahan baku tebu dengan petani sebagai penyedia bahan baku. Hal ini karena sebelum adanya sistem TRI PG. Kreet Baru sudah 100 persen menggiling dan mengolah tebu rakyat. Sedangkan terhadap peranan KUD Raga Separéh, perubahan sistem ini mengakibatkan keterlibatan peranan KUD dalam sistem tebu rakyat semakin besar dibandingkan dengan sebelumnya.
- (b) Peranan KUD dalam pembinaan dan bimbingan teknis kepada petani peserta TRI melalui penyuluhan cukup baik, yaitu 68,18 persen petani tebu memberikan tanggapan bahwa pelaksanaan penyuluhan sesuai dengan kebutuhan dan sering dilaksanakan, sedangkan 31,82 persen petani tebu memberikan tanggapan sebaliknya.
- (c) Peranan KUD dalam pelayanan sarana produksi berupa bibit, pupuk dan obat-obatan belum 100 persen petani tebu mendapatkan pelayanan dari KUD. Ternyata dalam hal pengadaan bibit, KUD belum mampu karena keterbatasan tenaga ahli yang dimiliki oleh KUD, dengan demikian bibit masih

Hak Cipta dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

dikelola oleh pabrik gula. Untuk pengadaan pupuk dan obat-obatan masalah yang dihadapi adalah keterlambatan, disamping juga karena kesadaran petani tebu sebagai anggota KUD masih kurang.

- (d) Berdasarkan pada keterlibatan petani anggota dan pengurus kelompok dalam pengelolaan usahatani tebu, maka bentuk kelompok tani tebu di wilayah KUD Raga Separih dapat digolongkan dalam bentuk kelompok koordinatif. Tingkat dinamika kelompok koordinatif tersebut cukup tinggi. Hal ini ditunjukkan pada peranserta anggota dalam pengambilan keputusan, membuat rencana dan membahas masalah bersama, serta peranserta dalam mengikuti pertemuan rata-rata adalah sebesar 88,76 persen. Hal ini disebabkan oleh latar belakang pengalaman petani dalam mengelola usahatani tebu sudah cukup lama, yaitu rata-rata 13,17 tahun, serta ditunjang dengan anggapan petani terhadap usahatani tebu yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan tanaman non tebu.
- (e) Hasil analisa pendapatan usahatani menunjukkan bahwa, pendapatan per hektar paling tinggi atau usahatani paling menguntungkan adalah usahatani TRIS II, kemudian berturut-turut usahatani padi-padi-padi, padi-padi-jagung, TRIS I, TRIT II, Sewa tanah dan pendapatan per hektar paling kecil pada usahatani TRIT I.
- (f) Hasil analisa R/C ratio menunjukkan bahwa usahatani padi-padi-padi mempunyai R/C ratio paling tinggi,

kemudian berturut-turut pada usahatani padi-padi-jagung, TRIS II, TRIT II, TRIT I dan paling kecil R/C ratio pada usahatani TRIS I. Hal ini menunjukkan bahwa usahatani padi-padi-padi mempunyai tingkat hasil guna pemakaian modal yang paling tinggi, sedangkan usahatani TRIS I sebaliknya.

(g) Hasil telaahan tingkat komersialisasi berdasarkan analisa ratio tenaga kerja menunjukkan bahwa untuk usahatani TRIS I adalah sebesar 0,8130, artinya 81,30 persen tenaga kerja untuk proses produksi berasal dari luar keluarga. Hal ini tidak berbeda jauh dengan nilai ratio tenaga kerja pada usahatani TRIT I, yaitu sebesar 0,8156 artinya 81,56 persen tenaga kerja untuk proses produksi berasal dari luar keluarga.

(h) Berdasarkan analisa ratio sarana produksi, ternyata petani tebu sudah mutlak 100 persen bersifat komersial, artinya semua kebutuhan sarana produksi berupa pupuk, bibit dan obat-obatan dipenuhi dari luar keluarga.

(i) Berdasarkan analisa ratio tenaga kerja dan ratio sarana produksi, secara keseluruhan petani tebu rakyat di wilayah kerja KUD Raga Separéh sudah menuju sistem usaha komersial.

2. S a r a n

Untuk meningkatkan fungsi dan peranan KUD dalam pengembangan usahatani tebu rakyat, maka usaha pembinaan harus ditingkatkan, baik pembinaan pengurus maupun pembinaan petani anggota KUD, yaitu :

- (1) Pembinaan pengurus KUD terutama diarahkan untuk meningkatkan kemampuan KUD dalam manajemen usahatani agar KUD mampu meningkatkan pelayanan, baik pada petani anggota maupun bukan anggota KUD.
- (2) Pembinaan petani tebu anggota KUD dalam sistem TRI hendaknya diarahkan pada bentuk kelompok kooperatif, yaitu dengan jalan :
 - (a) Menterlibatkan petani secara langsung dalam proses manajemen usahatani, sehingga pengambilan keputusan dalam proses usahatani sepenuhnya ada ditangan petani.
 - (b) Meningkatkan peranan pengurus kelompok, dalam melakukan kegiatan yang sifatnya untuk efisiensi teknis dan ekonomis, misalnya mengkoordinasi masalah pupuk, bibit dan tenaga kerja untuk penebangan dan pengangkutan.
 - (c) Meningkatkan peranserta secara aktif dari seluruh anggota kelompok dalam menghadiri pertemuan, membahas masalah, dan membuat rencana bersama untuk kepentingan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

Anonymous, (1984). INPRES No. 4 Tahun 1984, Tentang Pembinaan dan Pengembangan Koperasi Unit Desa (KUD), Jakarta.

-----, (1983). SK. Mentan No. 10/SK/Mentan/BIMAS/1981, Tentang TRI MT. 1984/1985, Jakarta.

-----, (1981). SK. Mentan No. 002/SK/Mentan?BIMAS/1981, Tentang Pelaksanaan TRI MT. 1981/1982, Jakarta.

-----, (1981). SK. Menmud Urusan Koperasi No. 201/MK/1981, Tentang Pedoman Pelaksanaan TRI MT, 1981/1982 oleh KUD, Jakarta.

-----, (1981). Petunjuk Teknis Pemeriksaan Terhadap KUD, Departemen Perdagangan dan Koperasi, Dirjend Koperasi, Jakarta.

-----, (1983). SK. Bupati Dati II Malang No.123/1983, Tentang Pedoman Pelaksanaan Program TRI di Daerah Malang, MT. 1983/1984.

Adisasmito, Kusbiyanto (1984). Peranan KUD Dalam Pelaksanaan Program TRI, BP3G, Pasuruan.

Banoewidjojo, Moeljadi (1984). Pabrik Gula dan Tebu Rakyat, Universitas Brawijaya, Malang.

Cartwright, D dan A, Zender (1968). Group Dynamics, Research and Theory, Harper & Row, Publisher, New York.

Jenkins (1961). Group Devepment, Selected Reading Series One, Whashington 6, DC.

Kadarsan, HW (1983). Pembangunan Ekonomi Pertanian dan Masalah Pembangunan Ekonomi Dualis, Dept. Sosek, Faperta, IPB, Bogor.

Margono S, (1978). Kumpulan Bahan Bacaan Penyuluhan Pertanian Edisi ke Tiga IPB, Bogor.

Mubyarto, (1983). Politik Pertanian dan Pembangunan Pedesaan, Sinar Harapan, Jakarta.

-----, (1983). Masalah Industri Gula Di Indonesia, PERHEPI, Jakarta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

- Penny, DH, (1978). Masalah Pembangunan Pertanian Indonesia, PT. Gramedia, Jakarta.
- Soegijanto, (1981). Pembiayaan Produksi Pemasaran Gula Rakyat, Temu Karya Pembangunan Industri Gula, Jakarta.
- Soeharjo, A dan Dahlan Patong, (1973). Sendi-sendi Pokok Ilmu Usahatani, Dept. Sosek, Faperta, IPB, Bogor.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi, (1982). Metoda Penelitian Survei, LP3ES, Jakarta.
- Soepranoto, Husein, (1984). Persepsi dan Harapan Pabrik Gula Terhadap Peranserta KUD dalam Program TRI, PT-IMACO, Surabaya.
- Suyatna, I Gde, (1982). Ciri-ciri Kedinamisan Kelompok sosial tradisional di Bali dan Peranannya dalam Pembangunan. FPS IPB, Bogor.
- Tjakrawiralaksana, Abas, (1982). Diktat Ilmu Usahatani, Dept. Sosek, Faperta, IPB, Bogor.
- Wharton, Clifton R, Jr (1969). Subsistence Agriculture and Economic Development, Aldine Publishing Co, Chicago.



L A M P I R A N

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber :
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB University.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB University.

Tabel

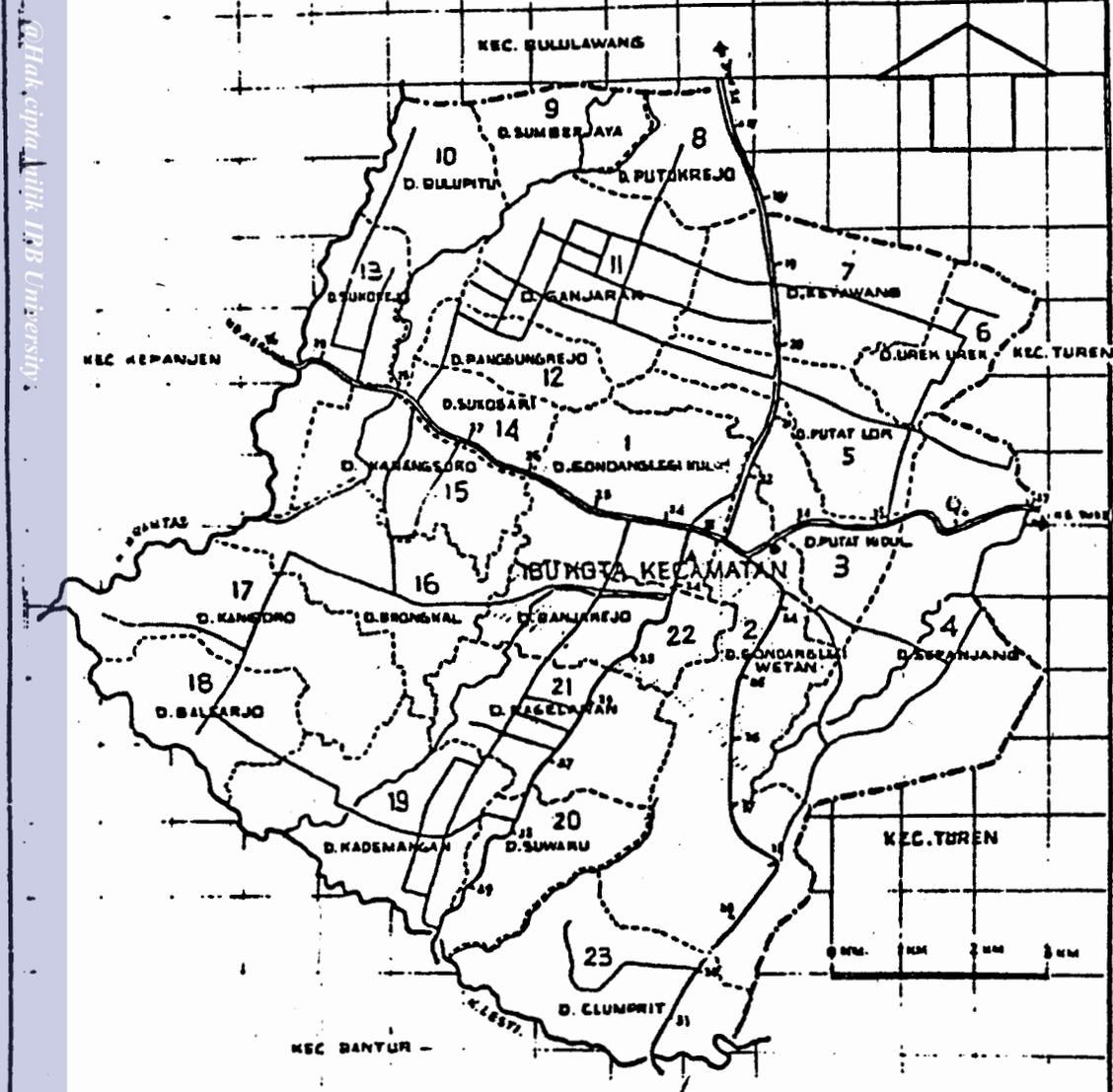
Lampiran 1. Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan di Wilayah Kerja PG. Krebet Baru Tahun 1982.

Bulan	Curah Hujan (mm)	Hari Hujan (hari)
Januari	282	15
Pebruari	292	13
Maret	169	10
April	217	8
Mei	2	0
Juni	10	0
Juli	0	0
Agustus	0	0
September	0	0
Oktober	0	0
Nopember	26	2
Desember	312	14

Sumber : Bagian Tanaman PG. Krebet Baru.

PETA WILAYAH KECAMATAN GONDANGLEGI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MALANG

(PERB. 1 : 80.000 .)



KETERANGAN :

- JUMLAH DESA 23 DESA.
- DATAS KECAMATAN.
- BATAS DESA.
- ==== JALAN PROPINSI.
- ==== JALAN KABUPATEN.
- ==== JALAN DESA.
- ~~~~ SUNSAI.
- 1 PAL KILOMETER.
- KOTA KECAMATAN.

- KANTOR KECAMATAN.
- " KEPOLISIAN (SEKTOR).
- ▲ " KORAMIL.

- DESA KOTA**
- 1. DESA GONDANGLEGI KULON.
 - 2. " GONDANGLEGI WETAN.
 - 3. " BANJARJO.